

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian memiliki tujuan yang telah disebutkan sebelumnya adalah untuk mengumpulkan bahan referensi dan perbandingan. Menghindari plagiarisme dan dugaan kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah alasan lainnya. Dengan demikian, peneliti merinci temuan-temuan dari studi ini dalam tinjauan pustaka ini. relevan sebelumnya sebagai berikut:

1. **Hasil penelitian Ditya Putri Wulansari, dan Pahlefi (2020)**

Penelitian yang dilakukan Ditya Putri Wulansari, dan Pahlefi (2020), berjudul “Sengketa Tanah Antara Korporasi Dengan Masyarakat Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Muaro Jambi”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dan meneliti: 1) Mengapa ada sengketa lahan di Kabupaten Muaro Jambi antara masyarakat dan sebuah korporasi. 2) Bagaimana menyelesaikan masalah tanah antara masyarakat dan perusahaan terkait stabilitas hukum di Kabupaten Muaro Jambi. Menggunakan metode mengumpulkan data, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini adalah investigasi hukum empiris. Menurut temuan studi tersebut, 1) perjanjian jual beli yang tidak didasarkan pada itikad baik, kepemilikan tanah tanpa dasar hukum yang jelas, dan penjualan yang tidak dilakukan oleh pemilik yang sah adalah penyebab utama sengketa tanah antara korporasi dan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi. 2) Penyelesaian masalah tanah di Kabupaten Muaro Jambi antara masyarakat dan korporasi. Ditelusuri dengan ketentuan berikut: ketentuan Pasal 37 dan Pasal 46 Peraturan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen) Peraturan Agraria. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan studi dokumentasi, wawancara, dan metode pengumpulan data.

Sementara itu, studi yang akan dilakukan oleh peneliti akan menekankan pada konflik gerakan sosial masyarakat Desa Sidorejo dalam masalah sengketa

tanah dengan PT. Perkebunan Cengkeh Branggah Banaran di Kabupaten Blitar serta pada mobilisasi sosial masyarakat, bukan hanya aspek legal formal. Variasi penelitian ini juga tercermin dari lokasi penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, metode penelitian dan rentang waktu penelitian yang berbeda.

2. Hasil penelitian Muhamad Oscar D Labanan, Nia Kurniati, dan Yulinda Adharani (2021)

Penelitian yang dilakukan Muhammad Oscar D Labanan, Nia Kurniati, dan Yulinda Adharani (2021), berjudul “Upaya Penyelesaian Konflik Lahan Garapan Masyarakat Kabupaten Berau Diatas Kawasan IPPKH PT. Berau Coal”. Salah satu masalah yang lebih kompleks dan berkepanjangan dalam hukum agraria adalah munculnya konflik dan sengketa tanah. Konflik atas tanah muncul ketika dua orang hukum memiliki kepentingan yang bertentangan pada properti yang sama. Ini menjelaskan mengapa masalah pertanian ini telah berlanjut hingga saat ini. Ada sengketa lahan di Kabupaten Berau antara masyarakat penggarap, yang mengerjakan area hutan dengan dilengkapi Sertifikat Penguasaan Lahan yang dikeluarkan oleh kepala desa, dan PT. Berau Coal, yang memegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kawasan Hutan Negara di Desa Gurimbang. Gurimbang akan dimanfaatkan untuk pertanian. Karena masing-masing pihak merasa berhak menggunakan Kawasan Hutan, hal ini menyebabkan ketegangan antara kedua pihak. Akibatnya, upaya penyelesaian sengketa lahan ini harus dilakukan melalui saluran non-litigasi menggunakan sistem mediasi-arbitrasi yang mencakup klausul perjanjian antara kedua belah pihak, khususnya transfer tanaman yang ditanam oleh PT. Berau Coal kepada Komunitas Penggarap Desa Gurimbang. Dengan memanfaatkan hukum dan peraturan yang relevan serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Hukum Normatif-Empiris. Penulis kemudian menggunakan teknik wawancara langsung untuk mengumpulkan data penelitian dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, dan hasil wawancara langsung ini menjadi sumber utama data dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup informasi dari undang-undang yang relevan, terutama yang berkaitan dengan pertambangan, kehutanan, dan urusan pertanian, serta teori-teori sengketa lahan

atau penyelesaian konflik, terutama di daerah hutan, dan penggunaan serta pengelolaan hutan.

Sementara itu, studi yang akan dilakukan oleh peneliti akan menyoroti pada konflik gerakan sosial masyarakat Desa Sidorejo dalam masalah sengketa tanah dengan PT. Perkebunan Cengkeh Branggah Banaran di Kabupaten Blitar mulai dari unjuk rasa, advokasi hingga represi negara. Variasi penelitian ini juga tercermin dari lokasi penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, metode penelitian dan rentang waktu penelitian yang berbeda.

3. Hasil penelitian Helvicha Ressay, Rika Lestari, dan Ulfia Hasanah (2022)

Penelitian yang dilakukan Helvicha Ressay, Rika Lestari, dan Ulfia Hasanah (2022), berjudul "Penyelesaian Sengketa Tanah PT Riau Andalan Pulp and Paper dengan Petani Kelapa Sawit Desa Dayun Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak". Metode kuantitatif digunakan dalam investigasi ini. Menurut temuan studi tentang elemen-elemen yang menyebabkan sengketa lahan antara Petani Kelapa Sawit Desa Dayun dan PT Riau Andalan Pulp and Paper, mereka dikategorikan dalam Beberapa kemenangan 1. Faktor petani, remunerasi yang tidak tepat, pemetaan lahan yang tidak jelas, tumpang tindih legalitas atau hak kepemilikan lahan, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai asal usul lahan. 2. Faktor PT RAPP dan 3. Faktor Pemerintah, seperti tumpang tindih pengeluaran lahan dan keputusan oleh lembaga terkait. Metode yang telah digunakan untuk menyelesaikan sengketa lahan adalah Mediasi adalah proses negosiasi kesepakatan antara pihak-pihak dengan bantuan seorang mediator. Di bawah pengawasan langsung Kepala Desa, mediasi berlangsung di aula Kantor Desa Dayun. Para pihak yang terlibat dalam konflik, PT RAPP dan petani kelapa sawit, diperkenalkan oleh Dayun. Tanah tersebut belum menjadi pusat perhatian. Hasil mediasi diterima oleh masyarakat bahwa PT RAPP dapat meningkatkan nominal tanah yang akan menjadi perhatian utama, yaitu sebelumnya berkisar antara IDR 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) menjadi IDR 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). membahas konflik lahan antara PT. RAPP dan petani kelapa sawit di Desa Dayun.

Perbedaan antara penelitian ini dengan studi yang dilakukan oleh Helvicha Ressay, Rika Lestari, dan Ulfia Hasanah (2022) terletak pada fokusnya, yakni penelitian Helvicha Ressay, Rika Lestari, dan Ulfia Hasanah berkaitan dengan konflik sengketa tanah di Kabupaten Siak. Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan fokus pada tahapan Gerakan sosial menurut blumer, bukan mediasi semata. Variasi penelitian ini juga tercermin dari lokasi penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, metode penelitian dan rentang waktu penelitian yang berbeda. (Ressay et al., 2022)

4. Hasil penelitian Naufal Rafi Rizqullah (2023)

Penelitian Naufal Rafi Rizqullah (2023), berjudul “Konflik Lahan Antara Masyarakat dan Pihak Swasta di wilayah Labi – Labi Kelurahan Alang – Alang Lebar Kota Palembang”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Menurut temuan studi, sengketa muncul ketika PT. Timur Jaya Group mengunjungi lahan perkebunan di daerah Labi, yaitu Labi Luarahan Alang-Alang Lebar, dan mengklaim kepemilikan lahan tersebut. Para penduduk setempat melakukan penggusuran paksa dengan izin kedua belah pihak, meskipun Pihak PT. Timur Jaya Group sebelumnya telah menjamin kompensasi untuk isi lahan perkebunan tersebut. Penduduk terlibat dalam sejumlah gerakan perlawanan untuk melindungi lahan perkebunan. Yaitu, dengan mencegah mesin-mesin besar yang digunakan untuk mengusir orang-orang dari tanah mereka. (Naufal Rafi Rizqullah, 2023)

Perbedaan antara penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah peneliti milik Naufal Rafi Rizqullah (2023) mengenai penggusuran paksa yang dilakukan oleh PT. Timur Jaya Group kepada masyarakat wilayah Labi – Labi Kelurahan Alang – Alang Lebar. Sedangkan dalam penelitian ini menelaah resistensi sosial melalui pendekatan tahapan gerakan sosial masyarakat Desa Sidorejo dalam masalah sengketa tanah dengan PT. Perkebunan Cengkeh Branggah Banaran di Kabupaten Blitar. Perbedaan penelitian ini juga dapat dilihat dari tempat penelitian, objek penelitian, subjek penelitian dan waktu penelitian.

5. Hasil Penelitian Fidela Aulia (2024)

Penelitian Fidela Aulia (2024), berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Dengan PT. Barito Putera Plantation”. PT Barito Putera Plantation, terbuka untuk bekerjasama dengan pihak lainnya, antara lain dalam pemanfaatan limbah dari hasil produksi kelapa sawit baik menjadi energi terbarukan maupun kegunaan lain yang besar manfaatnya di masyarakat. Namun, pertumbuhan industri perkebunan kelapa sawit ini menyebabkan konflik lahan antara masyarakat lokal dan mereka yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Meskipun perusahaan memiliki Hak Guna Usaha (HGU) untuk memanfaatkan tanah tersebut, masyarakat tetap berpendapat bahwa itu adalah tanah mereka. Berdasarkan latar belakang uraian di atas menurut peneliti, adanya konflik yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat menyebabkan konflik yang harus diselesaikan agar tidak ada lagi warga yang dapat mengganggu perusahaan atau warga yang merasa dirugikan dengan adanya perusahaan ini didirikan di daerah sekitaran wilayah warga. Memproses sumber daya hukum dalam penelitian hukum normatif pada dasarnya terdiri dari mengorganisir bahan hukum tekstual dan melakukan analisis kualitatif terhadapnya. dengan proses pemikiran yang konsisten dan metodis untuk menangani masalah yang sedang diteliti.

Sementara itu, studi yang akan dilakukan oleh peneliti akan focus pada perjuangan masyarakat Desa Sidorejo dengan pendekatan teori Gerakan sosial Blumer. Variasi penelitian ini juga tercermin dari lokasi penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, metode penelitian dan rentang waktu penelitian yang berbeda.

B. Sengketa Tanah

1. Pengertian Sengketa Tanah

Sebuah sengketa dapat didefinisikan sebagai konflik, perselisihan antara dua pihak, atau perselisihan antara dua pihak yang memiliki kepentingan berharga dalam uang atau properti masing-masing. Dari orde lama ke orde baru, era reformasi, hingga saat ini, sengketa lahan telah berlangsung sangat lama. Selalu ada masalah dengan kuantitas dan kualitas sengketa lahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Konflik atau sengketa lahan adalah masalah yang abadi dan terus-menerus, berlangsung selama bertahun-tahun atau bahkan

puluhan tahun dan terjadi di seluruh dunia. Konflik dan sengketa lahan adalah masalah yang rumit dan multifaset.

Menurut Priyatna Abdulrasyid, satu pihak mungkin benar dalam suatu sengketa, dan satu pihak juga mungkin memiliki hak hukum, yang berarti satu pihak mungkin benar dalam satu masalah dan pihak lainnya dalam masalah lain, atau keduanya menguntungkan kedua belah pihak, atau hanya salah satu dari mereka. Secara hukum, satu pihak mungkin benar, tetapi secara moral, pihak lainnya yang benar. Akibatnya, ketika dilihat dari berbagai sudut pandang, konflik pada dasarnya adalah perbedaan mendasar mengenai visi atau konsep yang membuat kedua belah pihak benar. Sejak era agraris, ketika sumber daya lahan mulai memainkan peran penting sebagai elemen produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia, ini telah menjadi bagian penting dari sejarah budaya dan peradaban manusia.

2. **Sengketa Pertanahan**

Perbedaan kepentingan pihak dalam sektor pertanahan adalah penyebab fundamental dari litigasi tanah. Dalam hal ini, penyelesaian yang adil dan seimbang dapat ditawarkan kepada pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan memastikan kepastian hukum yang diperlukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, di antara situasi-situasi lain yang melibatkan tanah di negara ini saat ini.

Menurut ahli Rusmadi Murad, definisi sengketa tanah yaitu sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu:

“Perselisihan hukum muncul dari keluhan pihak (individu atau badan hukum) yang mengandung keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik mengenai status tanah, prioritas, maupun kepemilikan dengan harapan memperoleh penyelesaian administratif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.”

Awaludin S.H. mendefinisikan sengketa tanah sebagai sengketa yang timbul dari penerapan hukum atau dari peristiwa hukum yang melibatkan sebidang tanah tertentu. Memahami apa itu tanah dan hukum yang mengaturnya adalah

hal yang perlu dilakukan sebelum seseorang dapat mengambil tindakan hukum untuk memastikan tidak ada perselisihan atau menerima konsekuensi hukum dari suatu peristiwa hukum.

Menurut Awaludin S.H., sejumlah keadaan dapat menyebabkan perselisihan, seperti:

- 1) Kegiatan hukum yang dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan Undang-Undang Pertanahan Nasional.

Sebidang tanah yang terdaftar dan sah yang informasinya sesuai dengan yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak dapat diperdebatkan. Selalu ada kemungkinan terjadinya perselisihan, terutama ketika berkaitan dengan perselisihan mengenai hasil rekayasa. Perselisihan tanah mungkin melibatkan satu atau lebih fakta yang berkaitan dengan sepetak tanah tertentu. Perselisihan yang melibatkan bidang tanah yang tidak terdaftar atau tidak terdaftar kemungkinan akan muncul.

- 2) Sengketa mengenai letak bidang tanahnya.

Penggugat mengklaim kepemilikan atas sebidang tanah di Jalan Cidurian Bandung dalam lingkungan tanah di bawah yurisdiksi Agung Sudrajat. Pemilik belum diminta untuk memberikan bukti kepemilikan. Gugatan tidak dapat diterima karena Agung Sudrajat tidak dapat memberikan alamat tanah yang menjadi milik Agung.

- 3) Sengketa mengenai batas bidang tanahnya.

Ketika pendaftaran tanah dilaksanakan untuk pertama kalinya, pemilik bidang tanah yang bersangkutan dan pemegang hak yang bertindak sebagai pemohon secara bersama-sama menentukan batas-batas bidang tanah yang akan didaftarkan. Mungkin ada perbedaan pendapat tentang di mana batas-batas ini harus ditentukan. Jika kedua belah pihak setuju, tanda batas yang sulit dipindahkan ditempatkan di setiap sudut. Data pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional dapat digunakan untuk menentukan dan menegaskan kembali lokasi tanda batas. Selain itu, perselisihan tentang batas dapat muncul ketika hak atas blok properti yang tidak terdaftar dijual atau ketika batas tersebut tertutup oleh tanaman merambat (seperti bambu) atau tidak ditandai.

4) Konflik tentang ukuran lahan.

Pembelian dan penjualan sebidang tanah yang tidak terdaftar, dengan cakupannya ditentukan dalam SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), IPEDA, dan sistem pajak tanah. Setelah selesai dalam konteks pembuatan surat survei, hasil pendaftaran wilayah pengukuran kemungkinan akan berbeda. Kemungkinan perselisihan mengenai jumlah yang dibayar tidak dipertimbangkan saat membeli dan menjual. Jika luasnya ternyata lebih kecil dari yang tercantum pada sertifikat pajak atau SPPT PBB yang bersangkutan, jumlah yang dibayarkan dianggap berlebihan; jika hasilnya lebih luas, dianggap tidak mencukupi. Karena akan selalu ada perbedaan antara luas yang diukur oleh BPN dan luas yang tercantum dalam materai pajak atau SPPT PBB, sangat penting untuk menetapkan kesepakatan mengenai harga pembelian untuk bidang tanah tanpa surat ukur. Dalam perjanjian jual beli, secara luas diterima bahwa luas yang diukur oleh Badan Pertanahan Nasional akan digunakan, terlepas dari pembayaran penjual.

5) Status tanah dan/atau pemegang hak biasanya menjadi pusat konflik lahan.

Ketika tindakan hukum diambil untuk mentransfer atau memberlakukan hak atas tanah yang belum terdaftar, kemungkinan terjadinya sengketa meningkat. Ada juga potensi konflik yang melibatkan bidang tanah terdaftar, yang muncul ketika informasi tentang status tanah atau pemegang hak ternyata tidak akurat. Tanah yang terdaftar memiliki sertifikat, yang merupakan dokumen yang menyatakan hak-haknya. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten atau Kota tempat tanah tersebut berada jarang mengeluarkan sertifikat yang ditampilkan kepada pembeli. Memeriksa rincian dalam sertifikat yang telah disediakan oleh calon penjual atau penerima kredit tidaklah cukup untuk melakukan tindakan hukum terkait bidang tanah terdaftar karena tidak jarang ditemukan sertifikat palsu. Setiap masalah tanah harus ditangani dengan terlebih dahulu menentukan siapa subjeknya dan hak-hak tanah apa yang termasuk dalam tanah tersebut. Karena setiap Hak Atas Tanah memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, proses identifikasi sangat penting.

C. Faktor-faktor Terjadinya Sengketa Tanah

Karena tanah adalah tempat di mana orang dapat tinggal dan bertahan hidup, tanah tidak terpisahkan dari semua aktivitas manusia yang ada. Karena setiap orang di komunitas membutuhkan tanah, seringkali terjadi perselisihan di antara mereka, terutama yang berkaitan dengan tanah. Dimulai dari zaman kuno hingga saat ini, konflik lahan berakar pada penyebab dasar dari perselisihan ini. Menemukan solusi atau jenis resolusi lainnya memerlukan identifikasi dan katalogisasi penyebab mendasar dari konflik lahan. Sektor pertanahan adalah salah satu bidang yang mengendalikan cara hidup warga negara yang juga diatur oleh perundang-undangan. UUPA, yang mengatur masalah tanah dan agraria di Indonesia, serta Pasal 33, ayat 30 UUD 1945 keduanya menetapkan aturan yang harus diikuti. Membangun dasar untuk memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat umum mengenai hak atas tanah adalah salah satu tujuan UUPA.

Secara umum faktor – faktor penyebab terjadinya sengketa antara masyarakat dengan PT. Perkebunan yang ada di sekitar kita, sebagai berikut :

1. Masalah Kepemilikan dan Hak Atas Tanah
 - a) Tumpang tindih antara hak guna usaha (HGU) perusahaan dengan tanah adat atau tanah masyarakat.
 - b) Sertifikat tanah yang tidak jelas atau belum terdaftar resmi.
 - c) Penggusuran atau pengambilalihan tanah tanpa ganti rugi yang layak atau tanpa persetujuan masyarakat.
 - d) Tidak diakuinya hak masyarakat adat atas tanah ulayat yang telah mereka Kelola turun-temurun.

2. Pelanggaran Hak terhadap Masyarakat Adat
 - a) Penggunaan lahan yang merupakan tanah ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat.
 - b) Ketidakterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan konsultasi proyek perkebunan.

- c) Lemahnya perjanjian tertulis yang melindungi kepentingan masyarakat.
- d) *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang tidak berjalan semestinya.

3. Dampak Lingkungan

- a) Pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan kimia dalam perkebunan
- b) Penggundulan hutan atau alih fungsi lahan yang merusak ekosistem local.
- c) Gangguan terhadap sumber air dan ekosistem akibat aktivitas perusahaan.

4. Ketidakseimbangan Ekonomi dan Sosial

- a) Masyarakat sekitar tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang adil dari keberadaan perusahaan.
- b) Upah pekerja perkebunan yang rendah atau kondisi kerja yang buruk.
- c) Konflik antara pekerja dan perusahaan terkait hak ketenagakerjaan.

5. Pelaksanaan Kemitraan yang Tidak Transparan

- a) Pola kemitraan atau skema plasma yang merugikan petani kecil.
- b) Perjanjian kerja sama yang tidak jelas atau tidak ditepati oleh perusahaan.
- c) Pembagian hasil yang tidak adil dalam pola kerja sama perkebunan.

6. Lemahnya Regulasi dan Penegakan Hukum

- a) Perusahaan tidak memiliki izin yang sah untuk mengelola lahan.
- b) Pelanggaran terhadap peraturan tata ruang atau tata kehutanan.
- c) Pengabdian terhadap rekomendasi atau peraturan dari pemerintah.
- d) Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap kepatuhan perusahaan terhadap regulasi.

- e) Lambatnya penyelesaian sengketa oleh pemerintah atau Lembaga hukum, sehingga konflik semakin berlarut-larut.

Secara faktual, ada sejumlah alasan mengapa kerangka hukum yang mengatur masalah tanah atau pertanian tidak sepenuhnya diterapkan. Berikut adalah beberapa penyebab sengketa atau masalah lahan kontemporer:

1. Ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah..
2. Penggunaan yang tidak sesuai dari tanah non pertanian dan pertanian.
3. Hak adat dan hak komunal lainnya atas properti tidak diakui.
4. Preferensi Sebagian kecil orang dari latar belakang sosial ekonomi kurang beruntung.
5. Pemegang hak atas tanah memiliki posisi tawar yang lemah ketika membeli tanah.

Maria S.W Sumardjono (Meiranda, Syamsunasir, Sukendro, & Widodo, 2023) menjelaskan beberapa permasalahan konflik pertanahan yaitu sebagai berikut:

1. Sebuah konflik kepentingan yang disebabkan bertentangan dalam bidang prosedural, psikologis, dan substantif (seperti hak atas tanah dan sumber daya pertanian lainnya).
2. Konflik nilai yang disebabkan oleh perbedaan gaya hidup, filosofi, agama, atau kepercayaan, serta dalam standar di mana suatu ide atau perilaku dinilai.
3. Perselisihan data yang disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau parsial, pandangan yang berbeda tentang isu-isu penting, interpretasi data yang berbeda, dan variasi dalam teknik evaluasi.
4. Konflik struktural yang diakibatkan oleh pola perilaku yang merusak, kekuasaan dan otoritas yang tidak setara, kontrol yang tidak setara atas kepemilikan atau alokasi sumber daya, serta elemen lingkungan, fisik, atau geografis yang membuat kolaborasi sulit.

5. Emosi yang berlebihan, persepsi yang salah, komunikasi yang tidak memadai atau salah, dan pola perilaku buruk semuanya dapat menyebabkan kesulitan dalam hubungan.

Elemen hukum dan non-hukum adalah dua kategori di mana penyebab umum konflik lahan dapat dibagi.

a) Faktor Hukum

Keberadaan undang-undang dan peraturan yang tumpang tindih serta peradilan yang tumpang tindih adalah dua kategori elemen hukum.

- (1) Apa arti tumpang tindih regulasi? Misalnya, dalam bidang sumber daya pertanian, UUPA adalah peraturan induk; namun, itu bukan undang-undang utama karena adanya peraturan lain, yang membuatnya berbeda dengan undang-undang sektoral yang baru-baru ini diberlakukan seperti undang-undang pertanian dasar dan undang-undang Kehutanan. Undang-undang investasi dan undang-undang pertambangan
- (2) Bagaimana mendefinisikan "peradilan tumpang tindih"? Misalnya, konflik tanah sekarang dapat ditangani oleh tiga organisasi yudisial negara sipil, pidana, dan administratif. Dalam sebuah pertempuran yang melibatkan kejahatan kriminal atau dalam salah satu pihak yang berwenang dalam administrasi negara (sebelum pengadilan tata usaha negara) menang dalam sengketa perdata tidak selalu menang.

b) Faktor non Hukum

Penggunaan lahan yang tumpang tindih, nilai ekonomi lahan yang tinggi, meningkatnya kesadaran publik tentang penggunaan lahan, berkurangnya penggunaan lahan seiring perkembangan komunitas, dan pertimbangan kemiskinan adalah variabel non hukum yang berkontribusi pada konflik lahan.

- (1) Sementara produksi makanan terus berlanjut atau dimungkinkan oleh fakta bahwa banyak lahan pertanian telah mengubah fungsinya, tumpang tindih penggunaan lahan dan pertumbuhan populasi yang cepat seiring waktu menyebabkan peningkatan populasi. Tidak dapat disangkal, kepentingan yang berbeda dapat berkembang di lahan yang sama.
- (2) Tanah adalah salah satu aset yang paling menjanjikan bagi masyarakat, baik untuk pendirian kawasan usaha perkebunan, sawah, pemukiman, maupun kawasan industri. Semakin tinggi nilai ekonomi tanah, semakin tinggi pula harga jualnya di pasar.
- (3) Meningkatkan kesadaran publik dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perkebunan serta adanya kemajuan di seluruh dunia. Karena properti tidak lagi dipandang sebagai komoditas ekonomi atau sarana investasi, perspektif orang-orang tentang kepemilikan tanah telah berubah.
- (4) Karena tanah bersifat permanen dan ekspansi populasi sangat cepat akibat urbanisasi, migrasi, dan kelahiran, tanah menjadi komoditas komersial yang sangat berharga. Akibatnya, setiap inci tanah dilestarikan sekuat mungkin.
- (5) Kemiskinan adalah masalah yang rumit yang dipengaruhi oleh sejumlah variabel yang saling terkait. Salah satu hal yang berkontribusi terhadap kemiskinan dalam hal sumber daya produktif yang tersedia dan aset yang terbatas adalah akses terbatas ke tanah.

D. Gerakan Sosial

Menurut Cohen, gerakan sosial adalah kelompok terorganisir dari individu yang ingin mengubah atau mempertahankan aspek-aspek tertentu dari masyarakat secara keseluruhan. Cohen melanjutkan dengan mengatakan bahwa gerakan sosial mencakup berbagai sifat, termasuk acara yang direncanakan, prinsip-prinsip panduan, dan tujuan yang harus dicapai.

Dalam buku mereka Michener dan Delamater (1999), Zurcher dan Snow menggambarkan gerakan sosial sebagai usaha kelompok yang menunjukkan minat besar terhadap isu-isu tertentu.

Menurut Touch dalam Kuppuswamy (1979), gerakan sosial adalah usaha oleh beberapa orang yang bekerja sama untuk menangani masalah yang muncul dalam suatu komunitas.

Gerakan sosial adalah tindakan dan keyakinan masyarakat dalam harapan perubahan dalam sejumlah situasi sosial, menurut Gusfield dan Allen (1980). Mengingat beberapa definisi gerakan sosial yang telah dibahas, jelas bahwa gerakan sosial adalah gerakan yang dilakukan oleh sejumlah besar orang yang terkoordinasi dan direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan gerakan. (Haris, AB Rahman, & Wan Ahmad, 2019)

Macionisme berpendapat upaya-upaya terkoordinasi untuk mempromosikan atau menghalangi perubahan sosial dikenal sebagai gerakan sosial. Konsep gerakan sosial Macionis mengidentifikasi dua ciri: aktivitas terkoordinasi dan tujuan terkait perubahan sosial. (Sukmana, 2016)

Menurut Macionis, proses gerakan sosial memiliki tahapan yang dapat disimpulkan menjadi empat tahapan, yakni :

1. Kemunculan (*emergence*)

Keyakinan bahwa keadaan buruk adalah yang memotivasi gerakan sosial. Pertumbuhan ketidakpuasan dapat memunculkan gerakan-gerakan tertentu, seperti gerakan hak sipil dan gerakan perempuan. Upaya kelompok kecil untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah tertentu juga melahirkan gerakan sosial.

2. Penggabungan (*coalescence*)

Sebuah gerakan sosial perlu mendefinisikan dirinya sendiri dan membuat rencana untuk go public setelah muncul. Para pemimpin perlu mampu memilih strategi untuk meningkatkan semangat, menetapkan kebijakan, dan menemukan anggota baru. Untuk menarik perhatian publik dan media, gerakan tersebut mungkin mengadakan protes besar-besaran

dan tindakan kolektif lainnya selama tahap penggabungan. Untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan, gerakan tersebut juga mungkin memilih untuk berkolaborasi dengan kelompok lain.

1. Birokratisasi (*bureaucratization*)

Sebuah gerakan sosial membutuhkan karakteristik birokratis (atribut birokratisasi) untuk menjadi kekuatan politik. Dengan cara ini, gerakan tersebut akan mendapatkan momentum dan kurang bergantung pada karisma pemimpin karena staf yang berkualitas akan mengambil alih perannya. Sebuah gerakan sosial berisiko cepat dilupakan jika tidak mendapatkan daya tarik.

2. Penurunan (*decline*)

Gerakan sosial pada akhirnya akan menjadi kurang signifikan. Sebuah gerakan sosial mungkin telah mengalami kemunduran karena lima alasan, menurut Macionis:

1. Gerakan sosial telah mundur (*success*) karena dianggap efektif dalam mencapai tujuannya.
2. Konflik internal atau ketidakcukupan organisasi adalah alasan sebuah Gerakan sosial runtuh (*failure due to organizational weakness or internal strife*)
3. Kooptasi para pemimpin telah menyebabkan Gerakan sosial memburuk (*cooptation of leaders*)
4. Pertimbangan tekanan (*repression*), terutama dari pihak luar, menyebabkan Gerakan sosial mengalami kesulitan

Ketika sebuah gerakan sosial telah menjadi arus utama (*establishment with in mainstream*), gerakan tersebut telah mengalami kemunduran. Tidak ada ancaman terhadap *status quo* karena gerakan tertentu dapat dimasukkan ke dalam sistem. (Sukmana, 2016)

Macionis membagi jenis-jenis gerakan sosial dibagi menjadi empat kategori: (1) gerakan sosial alternatif, (2) gerakan sosial pembebasan, (3) gerakan sosial reformasi, dan (4) gerakan sosial revolusioner. Kategori-kategori ini

didasarkan pada dimensi tujuan perubahan dan jumlah (tingkat) perubahan. (Sukmana, 2016)

Tabel 2.1 Jenis – jenis Gerakan sosial

	Terbatas	Menyeluruh
Individu	Gerakan Sosial Alternatif	Gerakan Sosial Pembebasan
Semua Orang	Gerakan Sosial Reformasi	Gerakan Sosial Revolusi

Sumber: Sukmana, 2016

Penjelasan dari tipe-tipe gerakan sosial menurut macionis adalah sebagai berikut:

1. Gerakan Sosial Alternatif

Karena tujuan mereka adalah membawa perubahan yang hanya mempengaruhi sebagian kecil dari masyarakat saat ini, gerakan sosial alternatif relatif tidak menentang *status quo*. Misalnya, gerakan sosial *Promise Keepers* berusaha menginspirasi pria Kristen untuk lebih taat pada iman mereka dan lebih fokus pada keluarga mereka.

2. Gerakan Sosial Pembebasan

Jenis gerakan sosial ini berfokus pada isu-isu tertentu tetapi berusaha untuk transformasi pribadi yang lebih dalam atau lebih mendalam. Salah satu contohnya adalah gerakan *Alcoholics Anonymous*, yang membantu mereka yang menderita alkoholisme dalam pemulihan dan kemampuan untuk menjalani hidup yang lebih baik.

3. Gerakan Sosial Reformasi

Salah satu jenis gerakan sosial yang berfokus semata-mata pada perubahan sosial individu adalah gerakan reformasi. Gerakan untuk

perbaikan sosial biasanya berlangsung dalam kerangka politik. Gerakan-gerakan ini bisa bersifat reaktif, bertujuan untuk mempertahankan *status quo*, atau progresif, mendorong pola sosial baru. *Multiculturalism*, sebuah gerakan politik dan pendidikan yang mempromosikan kesetaraan rasial untuk semua ras dan etnis, berfungsi sebagai ilustrasi.

4. Gerakan Sosial Revolusi

Berbeda dengan tiga kategori gerakan sosial lainnya, gerakan sosial revolusioner adalah yang paling radikal. Tujuan dari gerakan sosial revolusioner adalah untuk mengubah masyarakat secara radikal secara keseluruhan.

Menurut Locher, gerakan sosial diciptakan ketika sekelompok individu bersatu atau mengorganisir diri mereka sendiri dalam upaya untuk mendukung atau menentang perubahan sosial. Menurut Locher, tiga karakteristik organisasi, musyawarah, dan ketahanan membedakan gerakan sosial dari jenis tindakan kolektif lainnya seperti kerumunan, kerusuhan, dan pemberontak. (Sukmana, 2016)

1. Pengorganisasian (organized)

Aksi kolektif biasanya muncul tanpa organisasi, sedangkan gerakan sosial adalah aktivitas yang terorganisir. Misalnya, peserta kerusuhan mungkin berkooperasi untuk sesaat selama insiden tertentu, tetapi partisipasi mereka dalam kerusuhan tersebut bersifat sukarela, sementara, dan tidak direncanakan dengan tujuan tertentu.

Pemimpin dan peserta biasa dari sebuah aksi kelompok datang dan lenyap dalam sekejap. Meskipun anggota gerakan sosial sering kali diberikan tanggung jawab tertentu untuk dilaksanakan, di mana mereka juga secara sadar dan teliti menyusun taktik dan rencana tindakan, tidak ada tugas khusus yang diperlukan dari mereka dalam aksi kolektif. Para pemimpin gerakan sosial sering kali mendefinisikan dan mengembangkan peran serta tanggung jawab yang unik bagi anggota gerakan.

2. Pertimbangan (deliberate)

Pertimbangan dapat mengarah pada gerakan sosial. Sebagian besar kegiatan aksi kolektif terjadi tanpa perencanaan sebelumnya dari pihak mereka. Sebaliknya, gerakan sosial dipromosikan dengan giat dan penuh tujuan, dan anggotanya dengan hati-hati mempertimbangkan apakah akan bergabung atau tidak.

Janji dan insentif keanggotaan juga mendorong partisipasi; gerakan sosial bertujuan untuk menarik perhatian sebanyak mungkin agar dapat mendapatkan sebanyak mungkin pendukung. Aksi kolektif bukanlah faktor utama dalam masalah perencanaan ini.

3. Daya Tahan (endurance)

Sebuah gerakan sosial biasanya bertahan dalam waktu yang sangat lama atau tahan lama. Kegiatan kelompok, di sisi lain, terjadi dengan cepat. Misalnya, tren demam mode dapat bertahan selama beberapa bulan, tetapi kerusuhan hanya berlangsung beberapa menit, jam, atau hari. Sebaliknya, kegiatan gerakan sosial dapat berlanjut selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. (Sukmana, 2016)

Tabel 2.2 Bentuk Perilaku Kolektif

Aspek	Bentuk Perilaku Kolektif	
	Gerakan Sosial	Bentuk (<i>crowd, riot, rebel, fads</i>)
Pengorganisasian (<i>organized</i>)	Tugas-tugas dibagi, strateginya dipikirkan dengan matang, dan tentu saja ada pemimpin (<i>leaders</i>). Ini terstruktur dengan baik.	Mayoritas kurang terorganisir; Kerjasama peserta hanya bersifat sementara; Posisi para pemimpin tidak jelas.

Pertimbangan (<i>deliberate</i>)	Berdasarkan pertimbangan; kesadaran dan pertimbangan adalah dasar dari partisipasi peserta; Dorongan keanggotaan, publikasi, dan Mencari bantuan dari sejumlah besar individu	Terjadi tanpa persiapan sebelumnya; pengetahuan dan pertimbangan penuh peserta tentang keterlibatan kurang.
Daya Tahan (<i>enduring</i>)	Dengan waktu relatif lama	Dengan waktu sangat singkat

Sumber: Sukmana Tahun 2016

Locher juga menjelaskan bahwa ada beberapa tahapan dalam gerakan sosial yang harus dilalui oleh sebuah kelompok sosial:

1. *Incipient stage*

Ini adalah fase pertama, di mana kekhawatiran muncul di masyarakat dan mereka yang terkena dampak berkomunikasi secara efektif untuk bertukar informasi. Selain itu, ada pemimpin dan provokator yang dapat menyampaikan dan merangkul kepentingan masyarakat.

2. *Organizational stage*

Saat ini, peran seorang pemimpin semakin diperkuat, dan rencana aksi lapangan dimasukkan ke dalam agenda kegiatan, memastikan bahwa apa yang dilakukan di sana termasuk dalam rencana yang telah dibuat sebelumnya.

3. *Institutional stage*

Tahap akhir dianggap hasil dari banyak tahap gerakan sosial yang berpuncak pada fase institusional. Ini berarti, setelah dukungan dan pengamatan publik, gerakan sosial akan di institusionalisasi sebagai organisasi formal, dengan harapan bahwa gerakan tersebut akan terus ada untuk waktu yang lama. (Haris et al., 2019)

Locher membagi gerakan sosial kedalam empat tipe gerakan yang antara lain adalah:

1. *Alternative social movement*

Jenis gerakan sosial ini hanya berusaha mengubah sikap dan tindakan orang-orang tertentu dengan cara tertentu. Misalnya, organisasi GRANAT memimpin dorongan sosial untuk mendorong orang-orang agar menjauhi penggunaan narkoba, terutama di kalangan remaja, karena dampaknya terhadap pemuda negara ini sangat parah.

2. *Redemptive social movement*

Dengan fokus yang sempit, gerakan sosial ini bertujuan untuk mengubah perilaku kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Misalnya, inisiatif di dalam sekte tertentu yang bertujuan untuk mengubah keyakinan dan perilaku para pengikutnya.

3. *Reformative social movement*

Tujuan yang ingin dicapai, secara teori, berfokus pada perubahan komunitas yang spesifik. Pertimbangkan gerakan *People Power*, yang bertujuan untuk mengubah struktur politik dan pemerintahan yang telah dianggap sebagai kediktatoran dan penuh dengan kesepakatan yang canggung dan korup menjadi struktur yang demokratis, sopan, dan menghargai kesetaraan.

4. *Revolutionary social movement*

Dibandingkan dengan tiga kategori gerakan sosial lainnya yang disebutkan di atas, gerakan sosial revolusioner lebih peduli dengan melaksanakan perubahan menyeluruh dan komprehensif dalam setiap elemen kehidupan masyarakat, termasuk ideologi suatu negara. (Haris, et al., 2019)

Menurut Cohen, gerakan sosial adalah upaya terkoordinasi oleh sejumlah besar orang untuk mempertahankan atau mengubah aspek-aspek tertentu dari

masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, Cohen menjelaskan bahwa gerakan sosial menunjukkan ciri-ciri tertentu:

- a. Tujuan yang harus dicapai
- b. Gerakan yang direncanakan
- c. Kehadiran filosofi gerakan tersebut (Haris, et al., 2019)

Tipe gerakan sosial menurut Cohen terbagi menjadi beberapa tipe yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Gerakan Ekspresif

Dalam budaya modern yang maju, orang sering kali ingin menunjukkan keinginan mereka untuk mendapatkan belas kasih dan perhatian publik. Gerakan ini yang menciptakan model atau tren baru, seperti pakaian atau penampilan yang dipandang berbeda oleh orang lain. Kategori ini juga dapat dimasukkan ke dalam genre musik, seperti *breakdance*, yang merupakan cara yang disengaja bagi kaum muda Amerika pada awal 1980-an untuk mengekspresikan emosi mereka.

2. Gerakan Regresif

Salah satu jenis gerakan sosial yang dilakukan secara sengaja oleh sekelompok individu dengan niat mengembalikan *status quo* saat ini dikenal sebagai gerakan regresif. Gerakan sosial regresif dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak puas dan khawatir tentang keadaan masyarakat. Salah satu contohnya adalah gerakan yang dipimpin oleh Ku Klux Klan, yang bertujuan untuk merendahkan status sosial hak-hak sipil dan kebebasan orang kulit hitam.

3. Gerakan Progresif

Tujuan utama dari gerakan progresif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup kelompok sosial tertentu. Misalnya, apakah ada gerakan sosial di dalam organisasi buruh atau serikat pekerja yang berbentuk demonstrasi dan aksi unjuk rasa yang menyerukan kenaikan gaji bagi karyawan dan pekerja lainnya.

4. Gerakan Reformis

Jenis gerakan sosial reformis ini terutama berfokus pada pembaruan dan perubahan aspek-aspek tertentu dari masyarakat sosial. Misalnya, pada Mei 1998, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengorganisir gerakan sosial dan menyerukan reformasi serta perbaikan, terutama terkait dengan praktik nepotisme, korupsi, dan kolusi. Ini mengarah pada pembentukan Reformasi'98. Hal yang sama dapat dikatakan untuk Uni Soviet pada tahun 1980-an, ketika rakyat di sana menyerukan reformasi dan perubahan yang mengarah pada pembubaran Uni Soviet dan pembagian selanjutnya menjadi sejumlah negara merdeka, otonom, dan berdaulat, termasuk Rusia, Kazakhstan, Ukraina, dan lainnya.

5. Gerakan Utopian

Lingkungan yang ideal dan menguntungkan bagi kelompok tersebut adalah tujuan dari gerakan utopian, yang merupakan gerakan sosial yang dipimpin oleh sekelompok orang. Separatis yang berusaha menciptakan negara baru dengan memisahkan diri dari negara berdaulat yang ada adalah contoh dari gerakan sosial utopis.

Gerakan kelompok separatis sering hadir di beberapa negara di seluruh dunia. Namun, harus diakui bahwa gerakan sosial seperti ini adalah manifestasi dari kekecewaan, frustrasi, dan ketidakpuasan kelompok terhadap para penguasa, yang dianggap otoriter terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat karena mereka tidak adil, diskriminatif, eksploitatif, dan tidak transparan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa para separatis hanya berjuang dengan gigih untuk membangun negara baru yang mereka yakini akan membawa perdamaian dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan mereka. Ternyata, jenis gerakan separatis yang masih terlibat dalam konflik separatis, yang telah berlangsung cukup lama, sebenarnya telah mengarah pada pembentukan efektif sejumlah negara baru.

6. Gerakan Migrasi

Orang-orang yang tidak puas dengan keadaan sosial ekonomi mereka yang ada dan memilih untuk pindah dengan harapan mencapai kehidupan sosial ekonomi yang jauh lebih baik dan lebih ideal daripada yang mereka miliki di kampung halaman mereka adalah orang-orang yang melakukan gerakan migrasi. Tentu saja, ada juga faktor-faktor pendorong yang membuat mereka meninggalkan kampung halaman mereka, seperti kurangnya peluang kerja, gaji yang rendah, kurangnya fasilitas untuk pendidikan dan kesehatan, kurangnya pilihan hiburan, dan berbagai masalah lainnya. (Haris et al., 2019)

Menurut Lofland, ada enam indikasi berguna untuk mengevaluasi gerakan sosial dan pedoman berguna bagi mereka yang terlibat di dalamnya untuk menciptakan atau setidaknya memicu gerakan sosial sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Hal-hal seperti ideologi, doktrin, dogma, opini, aspirasi, pola pikir, wawasan, dan perspektif yang dianggap benar.

2. Organisasi

Bagaimana peserta atau individu dipandu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

3. Keikutsertaan

Variabel yang terkait dengan partisipasi yang mempengaruhi awal, perkembangan dan motivasi sebuah Gerakan sosial.

4. Strategi

Pendekatan terhadap upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan gerakan, dan bagaimana sesuatu dilakukan untuk mencapainya.

5. Efek

Dampak respons pihak luar terhadap Gerakan sosial, termasuk media, elit, penguasa, dan Gerakan sosial lainnya. (Rifana, 2019)

Menurut Singh, tiga kategori teoritis dapat digunakan untuk mengkategorikan studi tentang gerakan sosial: gerakan sosial baru, gerakan sosial neo-klasik, dan gerakan sosial klasik. Sebagian besar penelitian tentang perilaku kolektif, termasuk kerusuhan, kerumunan, dan penolakan, termasuk dalam

gerakan sosial klasik. Dialektika Marxis dan gerakan sosial fungsional adalah dua model gerakan sosial neo-klasik. Neo-klasik juga menggabungkan kontribusi dari sosiolog India dan Barat. Kemanusiaan adalah salah satu topik yang diangkat oleh gerakan sosial baru, yang bersifat universalistik dan bertujuan untuk melestarikan sifat manusia sambil mempertahankan keadaan mereka untuk memperbaikinya. (Sukmana, 2016)

"Sebuah kelompok yang memiliki kesadaran diri untuk bertindak, keprihatinan untuk mengungkap apa yang dilihatnya sebagai klaim-klaim dengan menentang elit, penguasa, atau kelompok lainnya" adalah bagaimana Sidney Tarrow mendefinisikan gerakan sosial. Menurut Tarrow, komponen-komponen tertentu sangat penting bagi keberadaan gerakan sosial. Dalam konteks perlawanan, komponen-komponen ini termasuk kolektif, tujuan bersama, solidaritas sosial, dan interaksi jangka panjang dengan otoritas, lawan, dan elit. Oleh karena itu, jaringan sosial dan pengorganisasian aksi kolektif adalah dasar dari gerakan sosial yang terlibat dalam politik perlawanan atau perselisihan, dan secara konstan membangun kemampuan untuk mempertahankan diri dari lawan yang tangguh.

Charles Tilly menyajikan perspektif yang berbeda, menggambarkan gerakan sosial sebagai rangkaian tindakan perlawanan yang berkelanjutan oleh kelompok-kelompok yang dirugikan terhadap mereka yang berkuasa melalui berbagai melalui berbagai demonstrasi publik, seperti tindakan yang dilakukan di luar saluran keterlibatan politik resmi yang diwajibkan secara hukum, untuk menunjukkan jumlah, kekuatan, dan dedikasi kelompok tersebut.

Secara umum, Tilly berpendapat bahwa gerakan sosial bersifat berkelanjutan, terorganisir dengan baik, menantang tantangan kesadaran diri, dan memiliki identitas bersama di antara para pesertanya. Alih-alih fokus pada gerakan sosial dengan pemain yang terorganisir secara khusus, Tilly menyoroti dinamika keadaan umum yang mendefinisikan ketidakpuasan, termasuk kerusuhan sosial, dan sifat-sifat yang ada di dalamnya.

Definisi Tilly tentang gerakan sosial sebagai "serangkaian interaksi yang berkelanjutan" (*sustained series of interactions*) antara otoritas dan lawan-lawannya yang mendasarkan tuntutan mereka pada preferensi dan kepentingan

konstituen tertentu menunjukkan sudut pandangnya secara teoritis.

Menjelaskan dari memeriksa beberapa definisi gerakan sosial yang telah disebutkan sebelumnya bahwa mereka memberikan tekanan pada konsep tersebut dalam beberapa cara, termasuk:

1. Pengejaran cita-cita yang bertentangan dengan kepentingan duniawi.
2. Selalu dikaitkan dengan pergeseran arah yang diyakini oleh para pendukungnya sebagai yang terbaik.
3. Menekankan elemen kolaboratif dari sebuah gerakan sosial, meskipun beberapa diantaranya juga mencakup elemen keberlanjutan, niat, dan struktur.

Beberapa ahli mendefinisikan gerakan sosial sebagai inisiatif yang berorientasi pada perubahan yang dilakukan secara kolektif untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Gerakan sosial ini adalah hasil dari kesenjangan yang diisi oleh organisasi yang kuat atau dominan. Gerakan sosial adalah kelompok yang dinamis, terkadang tidak resmi. Banyak dari mereka, di sisi lain, berkonsentrasi pada kegiatan kolektif serta gerakan kelompok yang dilakukan oleh organisasi di luar lembaga yang telah mapan, serta upaya untuk mencapai tujuan bersama dalam konteks perubahan.

Aktivitas "serangkaian perintah yang berkelanjutan" antara otoritas dan lawan-lawannya yang mendasarkan tuntutan pada pilihan dan kepentingan konstituen adalah istilah yang diusulkan oleh Charles Tilly, yang menawarkan alternatif. "Sekumpulan tindakan perlawanan kolektif" adalah konsep yang diperkenalkan oleh Tilly, yang sering ia sebut sebagai *repertoire*. Aspek repertoar gerakan tersebut terwujud dalam tindakan perlawanan kolektif menggunakan repertoar tersebut.

Tilly menegaskan bahwa hubungan keadaan perselisihan adalah salah satu komponen dari gerakan sosial. Gagasan ini menegaskan bahwa sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama sedang melakukan tindakan kolektif. Karena hal ini, sejumlah item dapat digunakan sebagai gerakan sosial yang melaporkan isu-isu, seperti:

1. Gerakan sosial terkoordinasi.
2. Mempertahankan keadaan atau membawa perubahan sosial adalah tujuan konstan dari Gerakan sosial.
3. Kegiatan terorganisir dilakukan oleh Gerakan sosial.
4. Tindakan oposisi dipertahankan oleh Gerakan sosial.
5. Klaim diajukan secara public oleh Gerakan sosial.
6. Tindakan perlawanan yang konstan dan berulang dilakukan oleh Gerakan sosial.
7. Gerakan sosial adalah gerakan yang mempertahankan politik perlawanan dan tidak terlibat dalam perjuangan kekuasaan secara langsung.
8. Gerakan sosial berkembang dan bertahan karena mereka mampu memanfaatkan peluang politik yang ada.
9. Identitas Gerakan dan solidaritas adalah karakteristik dari Gerakan sosial.

“Penolakan petani terhadap PT. Guthrie Pecconina Indonesia di Desa Kasmaran, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin” adalah fokus penelitian lapangan peneliti, yang akan diteliti menggunakan teori gerakan sosial terkini dari Charles Tilly. Ini akan didasarkan pada pemetaan gerakan sosial di atas. Fenomena perlawanan petani desa Kasmaran melampaui sadar konflik atau perlawanan sederhana melainkan serangkaian tindakan perlawanan yang menggunakan metode dan strategi kreatif untuk mencapai tujuan. Keadaan ini dihasilkan dari adanya ruang belajar yang disebabkan oleh pengalaman kegagalan perlawanan sebelumnya untuk mencapai tujuannya. Tindakan perlawanan kolektif dengan repertoar adalah istilah tingkat konseptual untuk realitas ini.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya tentang perlawanan petani, seperti yang dilakukan oleh Tahwali (2011), Afrizal (2007), dan Zaiyardam Zubir (2016), fenomena ini memberikan situasi yang unik dan berbeda. Menurut ketiga studi ini, gerakan sosial petani terlibat dalam perlawanan melalui tindakan mereka. Proses memperkuat pembentukan dan strategi gerakan, penguatan ideologi secara bersamaan untuk mencapai tujuan, dan cara pelaksanaan perlawanan semuanya dapat dianggap sebagai sumber perlawanan yang terjadi.

Gagasan repertoar dikembangkan dan disempurnakan oleh Charles Tilly pada

tahun 1970, 1978, dan 1995. Charles Tilly mendefinisikan repertoar sebagai seperangkat metode atau strategi yang digunakan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan atau pernyataan mereka; metode atau strategi ini berfungsi sebagai pilihan taktik dan strategi untuk tindakan kelompok. Antara tahun 1758 dan 1834, ide ini pertama kali digunakan untuk menganalisis konflik politik di Inggris, serta kasus-kasus perlawanan oleh pekerja tanah dan pertanian di Burgundy yang menyebabkan konflik politik setelah revolusi 1675–1957.

Menurut Tilly, repertoar adalah ide yang berguna untuk mengenali berbagai jenis perlawanan dan untuk mengkomunikasikan tuntutan yang dibuat oleh kelompok subordinat melalui pengembangan metode dan taktik yang telah diterapkan sebelumnya. Menurut Tilly, repertoar mungkin ada pada tingkat kelompok kecil tertentu yang menggunakan teknik aksi tertentu sebagai instrumen perlawanan dan untuk mengkomunikasikan klaim. Di sisi lain, itu juga bisa menjadi bagian dari kelompok besar yang menggunakan taktik dalam tindakan mereka sebagai alat tuntutan umum. Ini dapat digunakan sebagai strategi atau instrumen untuk mengkomunikasikan tuntutan bagi sejumlah besar orang kapan saja atau di mana saja.

Verta Taylor mengklaim bahwa penggunaan istilah "repertoar" oleh Charles Tilly adalah sebuah perbaikan pada teori mobilisasi, yang mengabaikan munculnya dan perkembangan tindakan perlawanan demi berkonsentrasi semata-mata pada proses penciptaan peluang, kepentingan, dan tindakan kolektif dalam gerakan sosial. Repertoar Menurut Charles Tilly, mobilisasi terjadi ketika gerakan menggunakan taktik dan metode untuk melawan guna mencapai apa yang diklaimnya, yang mengakibatkan inklusi perlawanan antara gerakan dan lawannya.

Sebagaimana teori repertoar Amy R. Proteete menjelaskan teori *repertoire* Tilly lebih rinci dalam proteete. Menurut Amy R. Proteete, repertoar adalah berbagai tindakan yang dilakukan oleh aktor yang imajinatif dan kreatif. Improvisasi dan inventivitas aktor dapat menyebabkan repertoar bervariasi sebagai respons terhadap kemungkinan atau berkembang secara alami. Akibatnya, repertoar memberikan fleksibilitas yang cukup tetapi tidak kebebasan penuh. Hanya tindakan potensial yang diwakili oleh tahap tindakan. Karena mencakup bentuk kekuasaan politik, kualitas aktivitas gerakan dalam repertoar dipengaruhi oleh keadaan latar

belakang kekuasaan.

Menggunakan potongan dari repertoarnya, Tilly menjelaskan mekanisme unit aksi perlawanan secara teratur. Unit-unit perlawanan ini terus-menerus terdeteksi oleh mekanisme waktu tertentu untuk menjelaskan kondisi perlawanan dan dinamika yang terjadi. Karena metode dan taktik yang digunakan sebagai senjata perlawanan untuk bertahan dan bahkan berkembang guna membentuk keadaan perlawanan terjadi secara sering, dengan kontinuitas dan ketekunan, transisi ini mungkin akan terjadi di episode mendatang.

Untuk meneliti berbagai bentuk tindakan perlawanan dari satu era ke era berikutnya dan menentukan orang-orang yang bertanggung jawab atas penggunaannya, Tilly menempatkan repertoar dalam kerangka yang lebih luas. Tanda awal dari situasi ini adalah munculnya teknik dan metode baru yang dapat digunakan secara kolektif oleh kelompok tersebut. Menurut teori Tilly, sebuah repertori maju dari tingkat lokal ke tingkat nasional dengan menggunakan mode aksi generik, yaitu dari orientasi rutin ke taktik yang menunjukkan perlawanan terhadap mereka yang berada dalam posisi kekuasaan atau lawan yang lebih tangguh. Transisi dari keadaan biasa ke keadaan yang dinamis dan dipercepat sebagai kondisi dari impulsif ke revolusioner dijelaskan lebih lanjut oleh Tilly.

Pada suatu waktu, Tilly menyoroti faktor-faktor berikut yang mempengaruhi perubahan dari satu bentuk repertoar lama ke bentuk baru:

1. Hubungan kebijakan diubah oleh pertumbuhan besar dan konsolidasi kekuasaan negara.
2. Peralihan dari kegiatan perlawanan kolektif ke kegiatan perlawanan populer.
3. Peralihan dari perlawanan kolektif yang berpusat pada penentangan terhadap pemilik modal ke penentangan terhadap kebijakan nasional.
4. Dari waktu ke waktu, kelompok-kelompok aktif terlibat dalam kegiatan perlawanan kolektif.
5. Mengubah aksi kolektif konfrontasi terbuka dari gugatan menjadi aksi kolektif undangan massa.
6. Dukungan dari kelas penguasa untuk oposisi, yang menciptakan ruang

bagi pemain baru untuk muncul.

7. Perlawanan bertindak sebagai sarana untuk terus-menerus menciptakan konsep-konsep baru dan membayangkan kembali tindakan kolektif yang telah lama ada.
8. Kapasitas untuk bertindak bersama, terutama dalam kelompok kecil, dengan memanfaatkan kemungkinan yang sudah ada.

Keadaan ini berdampak pada bagaimana strategi dan taktik dalam *repertoar* berkembang menjadi cara bertindak yang segar dan kreatif yang menentukan apakah suatu tujuan tercapai dan bagaimana perlawanan berlangsung.

Herbert Blumer memandang gerakan sosial sebagai bagian dari perilaku kolektif (collective behavior) yang berkembang melalui proses yang dinamis dan bertahap. Dalam pemahamannya, gerakan sosial bukanlah sesuatu yang langsung muncul sebagai institusi terorganisir, tetapi melalui proses pembentukan sosial dan kesadaran bersama. Menurut Blumer (dalam Macionis, 1999: 623), terdapat empat tahap dalam perkembangan gerakan sosial:

Empat Tahap Gerakan Sosial Menurut Blumer

1. ***Emergence* (Tahap Kemunculan)**
 - Gerakan muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap kondisi sosial yang ada.
 - Kesadaran terhadap masalah belum tersebar luas, hanya diidentifikasi oleh individu atau kelompok kecil.
 - Belum ada struktur organisasi atau kepemimpinan yang jelas.
2. ***Coalescence* (Tahap Penggabungan)**
 - Ketidakpuasan mulai dikomunikasikan secara kolektif.
 - Terjadi pembentukan tujuan bersama, kepemimpinan, serta strategi aksi.
 - Gerakan mulai melakukan tindakan terbuka seperti demonstrasi dan kampanye untuk mendapatkan perhatian publik.
3. ***Bureaucratization* (Tahap Birokratisasi)**
 - Gerakan berkembang menjadi organisasi formal.
 - Mulai memiliki staf, struktur, sistem komunikasi, dan pembagian tugas yang jelas.
 - Ketergantungan pada kharisma pemimpin berkurang karena digantikan oleh struktur birokrasi.
4. ***Decline* (Tahap Penurunan atau Kemunduran)**
 - Gerakan bisa menurun karena:
 - Tujuan telah tercapai (sukses),

- Adanya kooptasi pemimpin,
- Represi dari kekuasaan,
- Konflik internal,
- Atau gerakan dilembagakan ke dalam sistem.

E. Mobilisasi Sumber Daya

Menurut gagasan mobilisasi sumber daya, sebuah gerakan sosial akan muncul jika ada ketidakpuasan dalam masyarakat. Menurut gagasan ini, keberhasilan suatu gerakan sosial dapat dibantu atau terhambat oleh elemen organisasi dan kepemimpinan. Gagasan mobilisasi sumber daya saat ini merupakan kerangka teoritis yang sangat umum dalam bidang sosiologi untuk meneliti gerakan sosial dan aksi kolektif yang baru terbentuk (Buechler, 1995). Dinamika sosial yang memungkinkan munculnya dan keberhasilan suatu gerakan adalah penekanan utama dari Teori Mobilisasi Sumber Daya.

Di antara para pemikir yang menganut ini adalah aliran pemikiran Zald, McCarthy, dan McAdam. Teori mobilisasi sumber daya John D. McCarthy dan Mayer N Zald menyatakan bahwa gerakan sosial hanyalah respons yang tidak direncanakan terhadap keluhan dan ketidakpuasan. Ketersediaan sumber daya material, termasuk waktu, uang dan struktur organisasi, sangat penting bagi Gerakan sosial yang sudah ada, atau keterampilan organisasi, sama seperti jenis perilaku kolektif lainnya. McCarthy dan Mayer N. Zald keduanya menyoroti keadaan yang memfasilitasi konversi nilai-nilai menjadi tindakan nyata dan faktor-faktor yang memfasilitasi kolaborasi dan kompetisi di antara organisasi gerakan sosial dalam teori mobilisasi sumber daya mereka (Sigh, 2010: 134).

Salah satu komponen teoritis dari teori gerakan baru adalah gagasan mobilisasi sumber daya manusia. Keberagaman yang semakin meningkat dari aktor gerakan sosial adalah ciri khas kebangkitan gerakan sosial baru. Ketidakpuasan petani dan buruh tidak lagi menjadi sumber revolusi sosial. Namun, kelompok horizontal seperti perempuan, profesional, dan mahasiswa yang melahirkan gerakan sosial ini. Beberapa kekhawatiran, seperti hak asasi manusia, demokratisasi, perempuan, lingkungan, dan ketidakadilan, telah menyebabkan gerakan sosial berpindah dari yang terpusat menjadi menyebar ke berbagai pusat disiplin di antara akademisi dan aktivis perubahan. (Situmorang,

2013 : 10)

McCarthy menjelaskan ini dengan mengatakan bahwa seorang pemimpin memiliki dampak pada bagaimana sumber daya dikerahkan dalam sebuah gerakan sosial. Kehadiran seorang pemimpin mungkin penting.

Ini berfungsi sebagai pendorong dan faktor penentu dalam mobilisasi sumber daya untuk gerakan sosial. Menurut McCarthy dan Zald, komponen praktis dari mobilisasi sumber daya sangat penting untuk mencapai tujuan. 15. Dua fitur dijelaskan oleh teori mobilisasi sumber daya ini. Pertama, terkait dengan aset material, immaterial, dan moneter bahwa sebuah Gerakan memiliki untuk mencapai tujuannya, seperti jaringan, sumber daya, pengetahuan, atau kemampuan khusus. Baik individu maupun kelompok dapat mengendalikan sumber daya ini. Kedua, aspek adalah prosedur penting di mana pemain mencoba memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan Gerakan tersebut. Untuk mencapai tujuan gerakan, kedua elemen ini harus bekerja sama satu sama lain.

a) Gerakan Sosial Lama

1. Konsep tentang *Mass Society Theory* (Teori Masyarakat Massa)

William Kornhauser mengembangkan teori masyarakat massa (teori masyarakat Massa) (Locher, 2002: 249). *The Politics of Mass Society* adalah sebuah buku yang ditulis oleh Kornhauser dan diterbitkan pada tahun 1959. Melalui hipotesis masyarakat massa, Kornhauser menjelaskan bagaimana organisasi suatu masyarakat menghasilkan kategori perilaku tertentu dari anggotanya dan para pemimpinnya. Sebuah komunitas di mana banyak anggota warganya terasing yang memiliki banyak efek negatif pada elit dan pemimpinnya memiliki potensi untuk menjadi masyarakat massa. Terjadinya gerakan massa akan disebabkan oleh masyarakat massa. Gerakan massa adalah gerakan anti-demokrasi dengan tujuan mengubah populasi secara total. Orang-orang yang terlibat dalam gerakan massa biasanya percaya bahwa tujuan mereka adalah untuk membangun masyarakat ideal.

Gerakan massa, atau gerakan populer yang berfungsi di luar dan melawan tatanan sosial, adalah penekanan utama dari teori masyarakat massa. Seluruh masyarakat sering kali terpengaruh oleh gerakan besar ini. Mereka mungkin bertindak dengan cara yang merusak. Gerakan politik yang merusak yang berusaha memberantas kebebasan adalah ancaman bagi masyarakat massa. Masyarakat massa memiliki sejumlah ciri unik, beberapa di antaranya memungkinkan gerakan massa terjadi. Di antara ciri-ciri masyarakat massa adalah sebagai berikut:

1. *Atomization* (Atomisasi)

Orang-orang yang merasa tidak berdaya dan terasing secara sosial dalam masyarakat dikatakan teratomisasi. Atomisasi adalah apa yang disebut oleh sebagian besar sosiolog sebagai keterasingan. Orang-orang lebih cenderung bertindak dengan cara yang dimaksudkan untuk menghancurkan, merevolusi, atau mengubah masyarakat ketika mereka merasa terputus dari masyarakat tersebut.

2. *Access* (Akses)

Akses, dalam pandangan Kornhauser, merujuk pada berbagai dampak langsung yang dimiliki warga negara yang melampaui dampak pemimpin mereka. Menurut Kornhauser, jika warga negara memiliki terlalu banyak akses atau pengaruh langsung terhadap elit, mereka akan merasa tertekan untuk mengikuti daripada membimbing opini publik. Para pemimpin harus membuat keputusan yang mencerminkan kehendak rakyat dalam masyarakat di mana warga negara memiliki pengaruh langsung yang terlalu besar. Pemimpin menjadi gila dalam keadaan seperti ini.

3. *Availability* (Ketersediaan)

Tingkat dimana warga negara bersedia (tersedia) untuk dipersuasi oleh para pemimpin. Sangat mudah untuk mengendalikan orang karena terlalu banyak orang yang rentan dipengaruhi oleh para pemimpin. Dalam budaya dimana pemimpin individu memiliki

kekuatan untuk menarik minat dan keterlibatan seluruh populasi, hal ini mungkin dapat dikendalikan. Akibatnya, akan ada masyarakat massa. Non-elit mungkin mempengaruhi elit (*the accessibility of elites* dalam masyarakat massa, dan non-elit bersedia dimobilisasi oleh elit (*the availability of citizens*).

4. *Intermediate Groups* (Kelompok Menengah)

Menurut Kornhauser, kelompok menengah cenderung memperbesar sifat ini ketika mereka lemah. Organisasi komunitas, kelompok politik lokal atau regional, dan sebagainya adalah contoh kelompok menengah. Menghubungkan emosi orang dengan orang lain dan masyarakat adalah tujuan utama dari organisasi menengah. Oleh karena itu, mereka yang tidak terafiliasi dengan organisasi manapun di luar keluarga mereka cenderung menjadi anggota masyarakat massa yang paling dominan. Selain itu, Kornhauser menyatakan bahwa sebagian besar populasi tidak termasuk dalam kategori sosial mana pun.

5. *Mass Movements* (Gerakan Massa)

Sebuah masyarakat massa didefinisikan oleh atomisasi, ketersediaan, akses, dan pengelompokan perantara. Selain itu, gerakan massa cenderung muncul dari masyarakat massa. Penting untuk menyadari bahwa tidak setiap gerakan sosial adalah gerakan massa. Gerakan massa mungkin tidak rasional dalam penggunaan kekerasan dan memiliki tujuan yang ekstrem. Gerakan massa dicirikan oleh hal-hal berikut:

- (1) Berfokus lebih pada peristiwa global dan nasional daripada yang lokal dan pribadi.
- (2) Bereaksi langsung, menuntut agar jawaban segera dilaksanakan dan menolak untuk berdebat dan melobi.
- (3) Tidak stabil, dimana partisipasi dalam gerakan berskala besar seringkali tidak terencana, dan

(4) Terorganisir secara konsisten dan dengan tujuan, tanpa adanya organisasi, massa hanyalah kumpulan individu yang terpisah.

6. *Crisis Politics* (Krisis Politik)

Menurut Kornhauser, memeriksa reaksi ekstrem terhadap krisis politik adalah cara yang bagus untuk menggunakan pendekatan masyarakat massa. Masyarakat yang sehat dengan kondisi normal tidak memiliki gerakan massa. Dalam masa krisis, Ketika masyarakat dalam keadaan kacau, maka nada Gerakan massa.

7. *Culture and Personality* (Kepribadian dan Kultur)

Karena legitimasi budaya dan dukungan psikologis memberikan identitas dan kekuatan gerakan, baik kepribadian individu maupun elemen budaya memainkan peran penting dalam pembentukan gerakan massa. Oleh karena itu, dukungan psikologis dan legitimasi budaya adalah dua aspek dari elemen kepribadian dan budaya.

8. *Cultural legitimacy* (Legitimasi kultur)

Norma massa bersifat luas dan dapat berubah secara tiba-tiba dan sewenang-wenang. Semua orang harus mampu beradaptasi dengan kehendak mayoritas ketika nilai-nilai budaya mereka diutamakan di atas nilai-nilai mereka sendiri. Kornhauser menegaskan bahwa gerakan massa lebih mungkin muncul dalam budaya yang homogen.

9. *Psychological support* (Dukungan psikologis)

Kornhauser mengamati bahwa orang-orang merasa tidak mampu terlibat dalam lingkungan sosial mereka karena ketidakmampuan kelompok perantara untuk berinteraksi. Orang-orang memiliki reputasi negatif akibat merasa terputus dari masyarakat, yang membuat mereka semakin putus asa untuk mencari jawaban atas masalah yang timbul dari kesepian mereka.

Menurut gagasan masyarakat massa, masyarakat modern memiliki ciri-ciri berikut (Abercrombie, Hill & Turner, 2010: 335):

- 1) Pekerjaan rutin dan menyendiri;
- 2) Mayoritas orang sama, setara dan homogen, menunjukkan sedikit individualitas;
- 3) Meskipun ada kecenderungan orang-orang menuju ekstremisme intelektual, agama telah kehilangan pengaruhnya dan prinsip-prinsip moral tidak dipeluk dengan kuat;
- 4) Tidak ada ikatan keluarga yang bermakna dan hubungan individu sekuler yang lemah;
- 5) Budaya (termasuk sastra, seni, filsafat, dan sains) telah menjadi budaya massa, atau tingkat rasa terendah, dan populasi umum tidak peduli secara politik dan rentan terhadap manipulasi oleh birokrasi dan tirani.

Dengan menggunakan bahasa ini untuk menggambarkan masyarakat, penulis merendahkan konsep masyarakat massa dan mengaitkan masalah-masalahnya dengan kapitalisme atau industrialisasi. Beberapa topik ini disebutkan dalam karya-karya pemikir sosial abad kesembilan belas seperti Tocqueville dan Tonnies. Budaya pra-industri dan pasca-industri seringkali dibandingkan dalam materi tersebut. Namun, antara tahun 1920 dan 1960, perspektif khusus tentang masyarakat massa dikembangkan dalam tiga cara utama:

1. Sejumlah penulis Inggris, terutama kritikus sastra seperti F. R. Leavis dan T. S. Eliot, berbicara tentang penurunan moral publik dan hilangnya kebesaran sastra dan budaya. Pada dasarnya, mereka merespons masyarakat kapitalis dengan cara yang konservatif. Beberapa sosiolog, termasuk Mannheim, meneliti pandangan mereka;
2. Anggota Sekolah Frankfurt memeriksa aspek politik, bukan budaya, dari masyarakat massa, terutama setelah melarikan diri dari Jerman Hitler ke Amerika Serikat. Mereka berpendapat bahwa kapitalisme mendorong terbentuknya masyarakat massa, yang memudahkan kelas penguasa untuk mengendalikan politik populer. Ide ini menunjukkan pendekatan yang lebih

sosialis terhadap isu-isu sosial dan global antara perang; dan

3. Beberapa penulis Amerika memiliki pandangan yang lebih positif tentang masyarakat massa ketika mereka menggunakannya. Misalnya, politik aristokrat menjadi semakin menantang karena massa terlibat dalam keterlibatan politik, menurut E. Shils (1962).

Teori masyarakat massa dari Sekolah Frankfurt, yang berpendapat bahwa audiens bersifat relativistik, berbeda, dan rentan terhadap pengaruh program, memiliki dampak pada beberapa studi awal tentang media massa. Namun, karena (1) masyarakat modern tidak dilihat sebagai massa yang terbedakan tetapi lebih sebagai terdiri dari faksi-faksi yang bersaing, dan (2) elit tidak memanipulasi kelas bawah, gagasan masyarakat massa saat ini tidak terlalu penting dalam sosiologi. Mereka mungkin menyatakan ketidaksetujuan; dan (3) hubungan di seluruh komunitas dan dalam keluarga tidak terganggu (Abercrombie, Hill & Turner, 2010: 335)

Macionis (2009: 496) mendefinisikan masyarakat massa sebagai masyarakat di mana birokrasi dan kemakmuran telah merusak ikatan sosial yang telah lama ada. Gagasan masyarakat massa terkait dengan peradaban kontemporer dan era industri. Menggunakan pendekatan struktural-fungsional, Tonnies, Durkheim, dan Weber menjelaskan gagasan bahwa modernisasi adalah kebangkitan masyarakat massa. Abad ke-19, yang merupakan masa revolusi industri dan cenderung meratakan serta merusak tatanan norma-norma konvensional dan aristokrat, adalah tempat asal mula gagasan masyarakat sebagai keseluruhan.

Beberapa karakteristik peradaban kontemporer dicirikan oleh istilah "modernitas." Banyak teori sosiologi didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat pra-modern dan modern sangat berbeda satu sama lain. Kapan negara-negara Barat akan menjadi kontemporer dan kelebihan relatif dari kedua jenis masyarakat ini adalah topik yang sangat diperdebatkan. Faktor politik, sosial, budaya, dan ekonomi digunakan untuk membedakan modernitas. Peradaban modern, misalnya, biasanya terdiri dari sistem politik demokratis, ekonomi kapitalis industri, dan struktur sosial yang terbagi menjadi kelas-kelas. Aspek-aspek budaya yang diperdebatkan termasuk kecenderungan untuk memecah pengalaman,

komodifikasi dan rasionalitas dari semua aspek kehidupan, serta percepatan ritme kehidupan sehari-hari. Sistem baru untuk kontrol individu, disiplin, dan pengawasan diperlukan untuk modernitas. Fokus modernitas adalah pada mengukur dan mengendalikan kehidupan sehari-hari. Aktivisme, universalitas, dan netralitas afektif adalah beberapa cita-cita dari modernitas (Abercrombie, Hill & Turner, 2010: 355-356).

Berikut adalah sejarah studi tentang persepsi masyarakat secara keseluruhan: Filsuf politik seperti Alexis de Tocqueville menggunakan frasa "masyarakat massa" pada awal abad ke-19 untuk menggambarkan peran elit dalam mengubah sistem politik masyarakat Barat setelah Revolusi Perancis. Selain itu, Emile Durkheim menggunakan gagasan individu atomistik pada akhir abad ke-19 untuk menghubungkan masyarakat secara keseluruhan. Teori atomisme berpendapat bahwa masyarakat harus dilihat sebagai kumpulan individu yang saling berinteraksi, atau unit-unit individu, atau atom. Perspektif semacam itu mereduksi organisasi dan institusi sosial menjadi aktivitas individu. Menurut hipotesis atomistik ekstrem, sosiologi tidak dapat berfungsi dengan menyelidiki struktur umum masyarakat tetapi lebih dengan mempelajari individu dan makna yang diberikan pada aktivitas mereka. Dalam sosiologi, atomisme adalah antitesis dari holisme (Abercrombie, Hill & Turner, 2010: 30). Sementara itu, beberapa neo-Marxis dari abad ke-20, termasuk anggota Sekolah Frankfurt, berkonsentrasi pada studi masyarakat massa dalam kaitannya dengan masyarakat di mana orang-orang merasa saling terasing oleh industri budaya karena kepentingan kapitalisme.

Sepanjang abad ke-20, sejumlah filsuf konservatif menawarkan kritik yang beragam terhadap masyarakat massa. Jose Ortega Gasset, misalnya, meratapi hilangnya budaya tinggi di kalangan masyarakat umum. Sebaliknya, Beck berpendapat dalam *Risk Society* bahwa akan ada beberapa konsekuensi dari pertumbuhan berkelanjutan masyarakat industri. Mengenai teknologi, keahlian sekarang telah diterapkan secara reflektif, yaitu dengan mengurangi dampak dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebelumnya diterapkan. Lebih signifikan dari ini adalah proses individualisasi yang semakin berkembang, yang telah menyebabkan orang-orang semakin terasing dari ikatan tradisional mereka, seperti dengan keluarga, komunitas, atau kelas sosial mereka. Hanya melalui ikatan yang

berorientasi pasar mereka dapat terhubung satu sama lain. (Abercrombie, Hill & Turner, 2010: 463).

2. Masyarakat Massa (*Mass Society*) dan Teori tentang Politik Massa (*The Theory of Mass Politics*)

Para sarjana masyarakat massa percaya bahwa struktur sosial saat ini sangat berbeda dari masyarakat awal dan masyarakat non-industri (Gusfield 1962: 20). Namun demikian, ada kesamaan dalam menggambarkan inti dari masyarakat massa, termasuk menyoroti kelemahan organisasi lokal dan asosiasi dasar. Secara umum, sistem kesetiaan tidak resmi dalam asosiasi lokal dan kelompok kecil telah digantikan oleh interaksi birokratis dalam organisasi besar. Kekuatan sosial dan struktur politik komunitas yang terstratifikasi telah terganggu oleh keyakinan dan situasi egaliter. Standar tinggi dalam ide dan produksi telah dimungkinkan oleh kemajuan teknologi.

Menurut para pendukung teori masyarakat massa, kategori sosiologis tradisional seperti keluarga, kelas, komunitas, identitas etnis, dan sebagainya tidak lagi relevan dalam masyarakat massa. Sebuah masyarakat massa didefinisikan sebagai massa yang tidak terbedakan, tidak berbentuk, dan struktural. Dampak dari kurangnya perbedaan ini terhadap ikatan kesetiaan pada institusi politik demokratis diperiksa dalam politik massa.

Para pendukung politik massa memberikan ringkasan tentang masyarakat industri dan modernitas Barat, menggambarkannya sebagai masyarakat yang tidak memiliki afiliasi primer atau sekunder. Menurut Hannah Arendt, isolasi dan keruntuhan ikatan sosial tradisional adalah ciri-ciri pemimpin masyarakat massa, bukan kekejaman atau kemunduran. Dipercaya bahwa ekstremisme politik, yang mengambil bentuk kelompok anti-demokrasi, merupakan hasil dari dampak psikologis dan struktural dari kesetiaan politik terhadap prinsip dan praktik demokrasi. Para pendukung pandangan ini berpendapat bahwa sifat-sifat struktural dari kesetaraan dan birokratisasi melemahkan kemampuan asosiasi primer dan sekunder untuk menyampaikan norma-norma politik dan menanamkan nilai-nilai. Organisasi sekunder seperti sekolah, gereja, lingkungan, atau serikat pekerja

berfungsi dalam skala besar di masyarakat massa. Kehidupan anggota asosiasi hanya bersifat sekilas dan tangensial (pinggiran dan tangensial), dan tingkat serta identifikasi mereka dengan elit organisasi berkurang. Kelas ekonomi tidak lagi menjadi sumber motivasi atau minat yang signifikan dalam peristiwa politik karena tingkat mobilitas yang tinggi dan gaya hidup konvensional. Nilai-nilai pribadi dan karakter tidak terpengaruh oleh operasi institusi dalam masyarakat massa.

Individu menjadi tidak teratur secara pribadi setelah masyarakat massa hancur. Efek psikologis dari masyarakat massa ditandai oleh rasa keterasingan, yang merupakan frasa kunci untuk keadaan ini. Tindakan orang-orang yang terasing dari diri mereka sendiri dan orang lain dikenal sebagai alienasi. Marx mengubah makna asli istilah tersebut dari filosofis dan teologis menjadi sosiologis dalam Manuskrip Ekonomi dan Filosofis 1844. Marx berpendapat bahwa sistem sosial yang menolak esensi kemanusiaan adalah sumber keterasingan. Menurutnya, esensi manusia diekspresikan dalam pekerjaan dan usaha kreatif mereka yang direncanakan bekerja sama dengan orang lain untuk mengubah dunia di luar diri mereka sendiri. "Objektifikasi" adalah proses di mana orang menciptakan hal-hal yang mewakili kecerdasan manusia tetapi terpisah dari orang-orang yang menciptakannya. Alienasi terjadi ketika sebuah hal yang "berdiri berlawanan dengan dirinya sendiri sebagai kekuatan otonom" dan tidak lagi "miliknya" tidak lagi masuk akal bagi manusia setelah ia dijadikan objek. Tetapi "objektivitas" hanyalah pemisahan dari beberapa konteks sejarah kapitalisme. Satu kelompok, para kapitalis, mengklaim dan mengambil barang-barang yang dibuat oleh orang lain dalam masyarakat kapitalis. Alienasi dimulai pada titik ini. Marx memandang alienasi sebagai istilah structural yang menggambarkan struktur sosial dan ekonomi yang dipengaruhi oleh kapitalisme, serta sebagai keadaan subjektif yang merujuk pada pengalaman keterasingan orang-orang.

Konsep sosiologis tentang keterasingan akibat kehilangan telah digunakan untuk menggambarkan berbagai kejadian sejak pertama kali diusulkan oleh Marx. Ini termasuk rasa keterasingan dan ketidaknyamanan

terhadap masyarakat; persepsi penurunan moral dalam masyarakat; rasa ketidakberdayaan di hadapan institusi sosial yang kuat; dan karakteristik organisasi sosial birokrasi yang besar, tidak pribadi, dan kejam. Definisi keterasingan menurut Marx kurang mirip dengan konsep anomie Durkheim daripada dua interpretasi pertama. Pengamatan Weber mengenai kecenderungan birokrasi masyarakat kontemporer tercermin dalam istilah yang lebih belakangan (Abercrombie, Hill, & Turner, 2010: 21).

Dengan mengabaikan struktur sosial, ilmuwan sosial tahun 1950-an dan 1960-an di Amerika berfokus pada dimensi psikologis atau subjektif dari keterasingan. Mereka mengabaikan sosiologi kapitalisme Marx ketika memeriksa faktor-faktor struktural. Seeman (1959) menggunakan Skala Sikap untuk mengukur berbagai fase psikologis. Persepsi bahwa seseorang tidak memiliki kendali atas lingkungan sosialnya dikenal sebagai dimensi "ketidakberdayaan" dari keterasingan. "Ketidakbermakna" adalah keyakinan bahwa seseorang harus menggunakan metode ilegal untuk mencapai tujuan. Orang-orang mengalami "isolasi" ketika mereka merasa terputus dari standar dan cita-cita masyarakat. "Isolasi diri" adalah ketidakmampuan untuk terlibat dalam aktivitas yang bermanfaat secara psikologis. Blauner (1964) menegaskan bahwa teknologi produksi adalah faktor utama yang mempengaruhi keterasingan dan mengaitkan aspek-aspek subjektif ini dengan berbagai bentuk pekerjaan di industri kontemporer. Karena pekerja kerajinan memiliki kontrol atas pekerjaan mereka, memiliki "semua" tugas yang relevan, memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan rekan kerja di tempat kerja, dan memandang pekerjaan mereka sebagai bermanfaat secara psikologis, dia berpendapat bahwa keterasingan kurang umum terjadi pada pekerjaan kerajinan kuno.

Varma (1987: 421) menegaskan bahwa konflik antara masyarakat kapitalis yang sangat terstruktur dan pemerintah terpusat yang menekan orang berdasarkan konformitas yang kaku adalah salah satu isu penting yang telah diakui oleh kritikus sosial Barat di era modern. Fondasi organisasi dari masyarakat yang luas, rumit, dan terorganisir dengan baik ini sangat membantu. Hubungan pribadi kehilangan maknanya karena manusia

semakin dipandang sebagai produsen, dan organisasi sosial di mana dia menjalankan fungsinya memiliki tujuan yang begitu besar dan kompleks.

b) Gerakan Sosial Baru

Menurut Singh, Gerakan berskala besar yang menimbulkan kekhawatiran dan didasarkan pada karakteristik (*humanis*) mulai berkembang pada tahun 1960-an dan 1970-an, budaya (*cultural*), dan non-materialistik (*non materialistic*). Ini terutama berlaku di kalangan orang-orang di Eropa dan Amerika pada waktu itu. Ide dan tujuan gerakan sosial baru pada dasarnya bersifat universal dan bertujuan untuk melindungi orang-orang serta meningkatkan kualitas hidup mereka.

Berikut adalah ciri utama dari teori gerakan sosial baru, yaitu:

- a. GSB melihat dan memposisikan aktivitas Gerakan sosial sebagai usaha kelompok yang logis dan secara moral adil.
- b. Dengan modernisasi dan menyempurnakan teori-teori Gerakan sosial sebelumnya, seperti menggeneralisasi eksploitasi kelas (*Karl Marx*), teori keluhan yang lebih sesuai untuk digunakan dalam konteks saat ini dimana aksi kolektif tidak hanya dimotivasi oleh eksploitasi kelas kapitalis terhadap pekerja dalam masyarakat kapitalis menjadi lebih aplikabel.
- c. Studi tentang gerakan sosial semakin populer karena semakin banyak penelitian dan studi yang dilakukan di luar Amerika Utara dan negara-negara Eropa Barat.
- d. Gerakan sosial hanya berhasil mendefinisikan faktor-faktor yang memfasilitasi perkembangan Gerakan sosial, apakah mereka kuat atau lemah dan apakah Gerakan sosial tersebut dilaksanakan atau tidak. (Sukmana, 2016)

Gerakan sosial baru pada dasarnya bersifat jamak. Menurut Cohen, ekspresi gerakan sosial baru bergeser dari kekhawatiran tentang kebebasan sipil, regionalisme dan etnisitas, perlucutan senjata, feminisme, lingkungan, anti-rasisme, anti-realisme, dan seterusnya menjadi kekhawatiran tentang kebebasan individu dan perdamaian. Evolusi masyarakat modern menjadi masyarakat postmodern juga berdampak pada gerakan sosial baru. Ini karena gerakan sosial baru telah berevolusi

dari gerakan sosial lama atau klasik dan neo-klasik menjadi bentuk yang beradaptasi dengan zaman. Seseorang juga dapat berargumen bahwa cara gerakan sosial telah berubah terkait dengan bagaimana masyarakat telah berubah. (Sukmana, 2016)

Cohen mengklaim bahwa merestrukturisasi hubungan antara negara, masyarakat, dan pasar atau ekonomi adalah tujuan dari gerakan sosial baru. Selain itu, gerakan ini bertujuan untuk menciptakan platform terbuka untuk diskusi dan analisis berkelanjutan tentang wacana demokratis mengenai identitas dan orientasi, serta kebebasan individu, otonomi, dan kolektivitas.

Cohen mengatakan bahwa ada empat cara di mana gerakan sosial baru membatasi dirinya sendiri, termasuk:

1. Para pelaku Gerakan sosial baru tidak memperjuangkan pemulihan masyarakat utopis yang tidak dapat diakses dari masa lalu.
2. Tanpa mengabaikan gagasan egaliter resmi tentang perwakilan public, demokrasi, parlemen, dan partisipasi politik dalam kerangka hukum, para pelaku gerakan sosial baru berjuang untuk otonomi, keragaman, dan perbedaan.
3. Dengan pengecualian manifestasi fundamentalis dari gerakan sosial baru, para pelaku gerakan tersebut secara sadar mencoba belajar dari masa lalu dan merefleksikan keyakinan mereka melalui logika
4. Para aktor gerakan sosial baru mempertimbangkan keberadaan formal negara dan ekonomi pasar. (Sukmana, 2016)

Menurut Macionis, gerakan sosial baru dapat dianalisis berdasarkan karakteristiknya yang meliputi hal-hal berikut:

1. Mayoritas gerakan sekuler saat ini berkonsentrasi pada masalah yang berkaitan dengan lingkungan, status sosial perempuan dan orang-orang LGBT, hak-hak hewan, dan mengurangi kemungkinan konflik. Ini dianggap sebagai proses globalisasi yang menghubungkan negara-negara dan mengubah gerakan sosial menjadi fenomena internasional.
2. Sementara organisasi sosial tradisional atau yang lebih tua, seperti kelompok buruh, lebih fokus pada masalah ekonomi, masyarakat baru

seringkali lebih fokus pada reformasi budaya dan peningkatan lingkungan sosial dan fisik. Gerakan lingkungan internasional, misalnya, mengutuk tindakan yang memperburuk bahaya lingkungan, seperti pemanasan global.

3. Sementara gerakan sosial baru sering didukung oleh kelas menengah, sebagian besar gerakan sosial kuno didukung kuat oleh kelas pekerja.

Gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru berbeda dalam dua cara, menurut Pichardo:

- a. Gerakan sosial baru berbeda, terutama ketika mempertimbangkan struktur, aktivitas, taktik, filosofi, dan tujuannya
- b. Masyarakat pasca-industri telah melahirkan gerakan sosial baru, yang perhatiannya mencakup politik identitas, termasuk hak-hak minoritas, subkultur, lingkungan, perdamaian, dan sebagainya, daripada redistribusi ekonomi. (Sukmana, 2016)

Pichardo menegaskan bahwa sifat-sifat gerakan sosial baru dan gerakan sosial kuno klasik dan neo klasik secara esensial berbeda. Ada empat cara untuk melihat sifat-sifat Gerakan Sosial Baru, yaitu:

1. *Goals* (Tujuan)

Perbedaan pandangan ideologis dari gerakan sosial sebelumnya adalah komponen utama dari ciri-ciri gerakan baru tersebut. Kekhawatiran tentang gaya hidup dan kualitas hidup semakin ditekankan dalam gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru biasanya menggunakan strategi yang mengganggu, mengorganisir opini publik, dan beroperasi di luar saluran politik yang sudah mapan untuk mendapatkan kekuatan politik.

2. *Tactics* (Taktik)

Strategi yang digunakan oleh gerakan sosial yang muncul mengungkapkan sikap ideologis suatu gerakan. Arah tindakan anti-institusi sejalan dengan keyakinan pada kepribadian yang tidak khas dari demokrasi kontemporer.

3. *Structure* (Struktur)

Sikap anti-institusional dari gerakan sosial baru juga meresap ke dalam strategi organisasinya. Tujuan dari gerakan sosial baru adalah

meniru bentuk ideal representasi politik dalam sistem mereka sendiri.

4. *Participants* (partisipan).

Gerakan sosial baru ditandai oleh minat yang luas terhadap masalah sosial daripada dibatasi oleh kelas. Partisipasi dalam gerakan sosial baru didasarkan pada filosofi daripada komunitas yang didasarkan pada ras, agama, atau kelas. (Sukmana, 2016)

Cohen (1983) mengklasifikasikan berbagai jenis gerakan sosial ke dalam sejumlah kategori, termasuk yang berikut:

a) Gerakan Ekspresif

Orang-orang sering kali ingin menyampaikan keinginan mereka yang berbeda untuk mendapatkan belas kasih dan perhatian publik dalam budaya modern dan canggih saat ini. Misalnya, ada tren di kalangan remaja dan dewasa muda yang melibatkan pengembangan model dan gaya baru, baik dalam hal pilihan pakaian maupun penampilan yang dianggap berbeda dari yang lain. Genre musik seperti "Break Dance" di kalangan remaja Amerika pada awal 1980-an juga dapat dimasukkan dalam kategori gerakan ini, karena para penciptanya dengan sengaja menggunakannya sebagai cara untuk mengekspresikan emosi mereka.

b) Gerakan Regresif

Sekelompok orang dengan sengaja melaksanakan jenis gerakan sosial ini dengan tujuan mengembalikan situasi sekarang ke status sebelumnya. Dengan kata lain, orang-orang yang berpartisipasi dalam gerakan sosial regresif tidak puas dan marah dengan keadaan masyarakat saat ini. Misalnya, ada kecenderungan dalam Ku Klux Klan yang bertujuan untuk merendahkan status sosial kebebasan dan hak sipil orang kulit hitam Amerika.

c) Gerakan Progresif

Tujuan dasar dari gerakan ini, menurut mereka yang terlibat, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup kelompok-kelompok

tertentu dalam masyarakat. Misalnya, gerakan sosial dalam serikat pekerja telah mengambil bentuk protes dan demonstrasi yang menyerukan peningkatan upah bagi pekerja dan pekerja lainnya.

d) Gerakan Reformis

Jenis gerakan sosial ini, di sisi lain, lebih fokus pada memperbarui dan mengubah aspek-aspek tertentu dari masyarakat. Misalnya, pada Mei 1998, mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia berpartisipasi dalam gerakan sosial dan menyerukan reformasi dan perbaikan, terutama terkait dengan praktik nepotisme, korupsi, dan kolusi. Mirip dengan apa yang terjadi di Uni Soviet pada tahun 1980-an, ketika orang-orang menyerukan reformasi dan perbaikan, Uni Soviet runtuh dan terpecah menjadi sejumlah negara yang merdeka, otonom, dan berdaulat.

e) Gerakan Revolusioner

Sebenarnya, gerakan sosial revolusioner ini meningkatkan tuntutan pada tatanan sosial dan semua aspek kehidupan manusia saat ini berubah secara drastis, berbeda dengan gerakan reformasi, yang terutama menyerukan perubahan pada aspek-aspek tertentu dalam masyarakat.

Sztompka (2004) menjelaskan bagaimana revolusi berbeda dari jenis transformasi sosial lainnya, secara khusus:

- 1) Penerapan perubahan seluas mungkin, mempengaruhi semua aspek masyarakat, ekonomi, politik, budaya, struktur sosial, kehidupan sehari-hari, dan sifat manusia.
- 2) Tempat-tempat ini telah mengalami perubahan mendasar yang drastis yang berdampak pada fungsi sosial dan bangunan
- 3) Perubahan yang cepat dan mendadak, mirip dengan ledakan dinamit di tengah kemajuan bertahap dari proses sejarah
- 4) Untuk semua alasan ini, tanda perubahan yang paling jelas adalah revolusi, itu terjadi dengan sangat cepat dan karenanya sangat diingat.

f) Gerakan Utopian

Dalam gerakan sosial ini, sekelompok orang bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mereka yakini ideal dan bermanfaat bagi mereka. Gerakan sosial utopis, seperti yang dipimpin oleh separatis yang berusaha menciptakan negara baru dengan memisahkan diri dari yang sudah ada, memberikan satu contoh.

g) Gerakan Migrasi

Pada dasarnya, orang-orang yang menjadi bagian dari gerakan ini tidak puas dengan keadaan sosial ekonomi mereka saat ini dan telah memutuskan untuk pindah dengan harapan menjalani kehidupan sosial ekonomi yang jauh lebih baik. Tentu saja, ada alasan lain mengapa mereka meninggalkan kampung halaman mereka, seperti kurangnya peluang kerja, gaji yang rendah, dan fasilitas untuk kesehatan, pendidikan, dan hiburan, di antara banyak alasan lainnya.

Menurut Klandermans (1977:283), membagi jenis gerakan sosial menjadi dua tipe, yaitu beberapa macam, yaitu:

- 1) Gerakan Sosial Proaktif (*Proactive Social Movement*)
- 2) Gerakan Sosial Reaktif (*Reactive Social Movement*)

Tujuan dari gerakan sosial proaktif adalah untuk mendorong perubahan sosial. Mereka adalah jenis gerakan sosial tertentu yang muncul ketika orang menghadapi keadaan dalam hidup mereka yang tidak dapat mereka tahan. Gerakan sosial reaktif, di sisi lain, adalah gerakan yang dimulai ketika kondisi masyarakat berubah dan masyarakat bereaksi dengan menolak perubahan tersebut.

Selain kategori yang telah disebutkan sebelumnya, gerakan sosial juga dapat dibagi menjadi dua kategori tambahan: Gerakan Sosial Lama dan Gerakan Sosial Baru. Sosiolog Prancis Alan Touraine menggunakan frasa tersebut pada tahun 1975, sementara sosiolog Italia Alberto Melucci melakukan hal yang sama pada tahun 1980. Gerakan Sosial Lama biasanya dikaitkan dengan kepentingan satu kelompok saja, seperti gerakan buruh atau gerakan petani, dan berkonsentrasi pada isu-isu yang berkaitan dengan hal-hal material. Sementara itu, gerakan sosial yang

muncul seperti gerakan feminis atau gerakan lingkungan berurusan dengan ide atau prinsip. Dibandingkan dengan gerakan sosial sebelumnya, gerakan baru ini memperjuangkan berbagai macam kepentingan dan tujuan yang lebih luas. Menurut Suharko (2006), yang dikutip oleh Nash (2005).

Mengklasifikasikan fenomena nyata dari gerakan sosial ke dalam Gerakan Sosial Lama dan Gerakan Sosial Baru adalah tugas yang menantang. Pichardo, Singh, dan Suharko (2006:9–12). mengakui karakteristik dan elemen tertentu yang dikatakan membedakan antara gerakan sosial bersejarah dan modern, termasuk:

(1) Ideologi dan Tujuan

(a) Gerakan Sosial Lama

Pandangan mereka tentang perjuangan kelas, revolusi kelas, dan anti-kapitalisme lebih tercerahkan. Mereka sering fokus pada distribusi ekonomi dan perubahan struktural yang radikal.

(b) Gerakan Sosial Baru

Memiliki pandangan ideologi yang berbeda dan lebih plural. Mereka tidak hanya fokus pada distribusi ekonomi, tetapi juga pada isu-isu seperti anti-rasisme, anti-nuklir, feminisme, dan lingkungan hidup. Gerakan sosial baru memberikan perhatian lebih besar pada keadilan dan perlindungan kehidupan manusia secara universal. (Abercrombie Hill and Tuner, 2001;361)

(2) Taktik dan Pengorganisasian

(a) Gerakan Sosial Lama

Meniru struktur politik partai dan serikat pekerja. Untuk mempengaruhi bangsa, mereka sering menggunakan instrumen politik konvensional.

(b) Gerakan Sosial Baru

Tidak mengikuti kerangka politik partai dan organisasi serikat pekerja. Mereka memiliki dampak pada perubahan politik meskipun mereka lebih suka tidak terlibat dalam politik. Mereka lebih sering menggunakan mobilisasi massa untuk mengubah sikap dan nilai-nilai.

(3) Struktur dan Partisipan

(a) Gerakan Sosial Lama

Partisipannya berasal dari satu kelas tertentu, seperti kelas pekerja. Struktur organisasinya seringkali lebih hierarkis dan terpusat.

(b) Gerakan Sosial Baru

Partisipannya berasal dari berbagai basis sosial, seperti kelas menengah baru, mahasiswa, seniman dan individu yang tidak terlalu terlibat dalam pasar kerja. Struktur organisasinya lebih terdesentralisasi, terbuka dan non-hierarkis.

(4) Karakteristik Umum

(a) Gerakan Sosial Lama

Sifatnya lebih terbatas pada isu-isu kelas dan distribusi ekonomi. Mereka seringkali memiliki tujuan yang lebih spesifik dan terfokus pada perubahan struktural yang radikal.

(b) Sifatnya lebih plural dan inklusif.

Mereka mengusung isu-isu yang lebih luas dan bersifat non-materialistik, seperti kelestarian lingkungan dan hak-hak manusia. Mereka tidak hanya mencakup jangkauan regional, nasional, dan global yang lebih besar.

Gerakan sosial baru mungkin mewakili berbagai kepentingan publik dan berusaha mencapai sejumlah tujuan karena keberagamannya. Gerakan sosial baru tidak terbatas pada partai-partai di tempat tertentu dan dapat menjangkau audiens yang lebih, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Misalnya, karena masalah yang mereka soroti adalah masalah universal yang dihadapi masyarakat, gerakan sosial yang muncul yang berfokus pada isu keberlanjutan lingkungan kadang-kadang berhasil terhubung dengan pihak lain dari berbagai daerah dan bahkan negara lain.

Gerakan sosial baru biasanya menangani isu-isu yang berasal dari masyarakat sipil, berfokus pada saluran komunikasi dan identitas kolektif, serta menangani isu-isu yang berkaitan dengan demoralisasi struktur kehidupan sehari-hari daripada

negara atau ekonomi. Munculnya gerakan sosial baru di Indonesia yang melibatkan LSM yang bekerja dalam berbagai disiplin ilmu

Sebuah investigasi tentang bagaimana jaringan gerakan sosial diorganisir dan dikelola (Nugroho, 2015:21), bagaimana Teori Mobilisasi Sumber Daya diterapkan pada gerakan sosial (Rusmin, 2015:19), dan betapa pentingnya modal sosial bagi keberhasilan gerakan sosial-lingkungan (Yuanjaya, 2015:35). dan penggunaan media sosial oleh gerakan lingkungan (Kurniawan & Rye, 2014:53) mirip dengan perkembangan ini. Studi-studi tersebut berfokus pada sejumlah masalah sosial, seperti yang berkaitan dengan kesetaraan gender, pendidikan, hak anak, hak asasi manusia, dan lingkungan.

Sosiolog membagi gerakan sosial ke dalam beberapa kelompok, seperti yang dinyatakan oleh Blumer, Aberle, dan Cameron (Macionis, 1999: 617). Jenis-jenis gerakan sosial dikategorikan berdasarkan sejumlah faktor, termasuk tujuan gerakan dan strateginya. Ada dua jenis gerakan sosial: (1) umum dan (2) spesifik, adalah dua kategori di mana Blumer memisahkan gerakan sosial (Stolley, 2005: 189). Gerakan sosial umum adalah gerakan yang bertujuan untuk mengubah nilai-nilai masyarakat. Misalnya, gerakan perempuan bekerja untuk meningkatkan posisi dan persepsi perempuan. Di sisi lain, gerakan sosial tertentu—seperti gerakan anti-aborsi—memiliki tujuan yang lebih terdefinisi.

Empat kategori gerakan sosial adalah sebagai berikut: (1) Gerakan Sosial Alternatif (*Alternative Social Movements*); (2) Gerakan Sosial Penebusan (*Redemptive Social Movements*); (3) Gerakan Sosial Reformis (*Reformative Social Movements*); dan (4) Gerakan Sosial Revolusioner (*Revolutionary Social Movements*). Kategori-kategori ini didasarkan pada dimensi siapa yang berubah dan seberapa besar perubahan tersebut.

Selain itu, empat kategori gerakan sosial dijelaskan sebagai berikut (Macionis, 1999; Locher, 2002):

- (1) *Alternative Social Movement* (Gerakan Sosial Alternatif), jenis gerakan sosial ini bertujuan untuk mengubah hal-hal hanya untuk sebagian orang, sehingga menimbulkan sedikit bahaya bagi tatanan sosial. Salah satu

gerakan sosial yang mendorong pria Kristen untuk lebih taat dan perhatian terhadap keluarga mereka disebut *Promise Keepers*.

- (2) *Redemptive Social Movement* (Gerakan Sosial Pembebasan), dengan kata lain, semacam gerakan sosial yang berfokus secara selektif namun bertujuan untuk membawa perubahan yang signifikan (lebih mendalam) pada orang-orang. *Alcoholics Anonymous*, misalnya, adalah sebuah kelompok yang membantu mereka yang menderita alkoholisme dalam pemulihan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.
- (3) *Reformative Social Movement* (Gerakan Sosial Reformasi), dengan kata lain, semacam gerakan sosial yang hanya bertujuan untuk mengubah masyarakat dengan cara yang menguntungkan semua orang. Sistem politik biasanya menjadi latar bagi gerakan sosial reformis. Gerakan-gerakan ini dapat bersifat reaktif (gerakan tandingan yang bertujuan untuk mempertahankan *status quo*) atau progresif (mendukung pola sosial baru). Misalnya, multikulturalisme adalah gerakan politik dan pendidikan yang mempromosikan kesetaraan sosial bagi individu dari semua ras dan etnis.
- (4) *Revolutionary Social Movements* (Gerakan Sosial Revolusi), Ini bertujuan untuk mengubah masyarakat secara fundamental dan merupakan yang paling agresif dari berbagai jenis gerakan sosial.

Zanden (1988: 575), dengan pendekatan yang agak berbeda, membagi gerakan sosial menjadi empat kategori berdasarkan tujuan ideologisnya:

- (1) *Revolutionary Movements* (Gerakan Revolusi). Tujuan dari jenis Gerakan revolusioner adalah untuk menggulingkan cita-cita saat ini.
- (2) *Reform Movements* (Gerakan Reformasi). Berusaha mengubah hal-hal untuk memperkuat penerapan dan pelaksanaan cita-cita saat ini.
- (3) *Resistance Movements* (Gerakan Perlawanan). Berusaha menghentikan perubahan terjadi atau menghilangkan perubahan sebelum menjadi resmi, dan
- (4) *Expressive Movements* (Gerakan Ekspresif). Dengan menerapkan inovasi atau pembaruan, bentuk perubahan Gerakan ekspresif lebih fokus pada

perubahan internal dan kurang pada perubahan institusional.

Menurut tujuannya, Spencer (1982: 506) membedakan tujuh kategori gerakan sosial:

- (1) *Revolutionary Movement* (Gerakan Revolusi), sebuah gerakan dramatis yang bertujuan untuk menggulingkan otoritas yang telah ada dan dapat menggunakan kekerasan jika diperlukan, seperti Gerakan bersenjata;
- (2) *Reform Movement* (Gerakan Reformasi), bertujuan untuk menangani masalah saat muncul, seperti Gerakan hak sipil dan Gerakan perempuan;
- (3) *Reactionary Movement* (Gerakan Reaksi), yang percaya bahwa tatanan sebelumnya lebih baik daripada yang sekarang dan berusaha mengembalikan kehidupan ke keadaan sebelumnya;
- (4) *Conservative Movement* (Gerakan Konservatif), merupakan Gerakan Lasung berusaha untuk menegakkan prinsip-prinsip budaya mereka. Organisasi konservatif, misalnya, berusaha melindungi bangunan bersejarah dan menghambat pertumbuhan serta transformasi kota-kota besar;
- (5) *Utopian Movement* (Gerakan Utopia), memiliki tujuan jangka Panjang dan bercita-cita untuk menciptakan jenis masyarakat yang berbeda dari yang ada saat ini;
- (6) *Religious Movement* (Gerakan Religius), memiliki tujuan keagamaan, seperti Gerakan mistis dan akhirnya, ada Gerakan nasionalis atau etnis memiliki peran penting dalam mewujudkan perubahan di dunia modern. Misalnya: *The Chicano, Black, and American Indian Movements*.

Menurut gagasan mobilisasi sumber daya, sebuah gerakan sosial akan muncul jika ada ketidakpuasan dalam masyarakat. Menurut gagasan ini, keberhasilan sebuah gerakan sosial dapat dibantu atau terhambat oleh elemen organisasi dan kepemimpinan.

Gagasan mobilisasi sumber daya saat ini merupakan kerangka teoritis yang sangat umum dalam bidang sosiologi untuk memeriksa gerakan sosial dan tindakan kolektif yang baru terbentuk. Dinamika sosial yang memungkinkan munculnya dan

keberhasilan suatu gerakan adalah penekanan utama dari Teori Mobilisasi Sumber Daya.

Di antara para pemikir yang menganut aliran pemikiran ini adalah Zald, McCarthy, dan McAdam. Hipotesis mobilisasi sumber daya John D. McCarthy dan Mayer N. Zald berpendapat bahwa gerakan sosial hanyalah reaksi spontan terhadap keluhan dan ketidakpuasan. Seperti jenis aktivitas kolektif lainnya, gerakan sosial bergantung pada ketersediaan sumber daya material, seperti waktu, uang, struktur organisasi yang sudah ada, atau keterampilan organisasi. Baik McCarthy maupun Mayer N. Zald menekankan kondisi-kondisi yang memungkinkan cita-cita diterjemahkan ke dalam tindakan konkret serta elemen-elemen yang memfasilitasi kolaborasi dan kompetisi di antara organisasi gerakan sosial dalam teori mobilisasi sumber daya mereka.

Salah satu komponen teoritis dari teori gerakan baru adalah gagasan mobilisasi sumber daya manusia. Keberagaman yang semakin meningkat dari aktor gerakan sosial adalah ciri khas kebangkitan gerakan sosial baru. Ketidakpuasan petani dan buruh tidak lagi menjadi sumber revolusi sosial. Namun, kelompok horizontal seperti perempuan, profesional, dan mahasiswa yang melahirkan gerakan sosial ini. Sejumlah penyebab, seperti hak asasi manusia, demokrasi, perempuan, lingkungan, dan ketidakadilan, telah menyebabkan studi tentang gerakan sosial beralih dari terpusat menjadi menyebar ke banyak pusat disiplin di kalangan akademisi dan advokat perubahan.

McCarthy menjelaskan ini dengan mengatakan bahwa seorang pemimpin memiliki dampak pada bagaimana sumber daya dimobilisasi dalam sebuah gerakan sosial. Kehadiran seorang pemimpin mungkin penting. Ini berfungsi sebagai pendorong dan faktor penentu dalam mobilisasi sumber daya untuk gerakan sosial. Menurut McCarthy dan Zald, komponen praktis dari mobilisasi sumber daya sangat penting untuk mencapai tujuan.

Gagasan mobilisasi sumber daya ini menjelaskan dua hal. Untuk mencapai tujuan gerakan tersebut, pertama-tama berkaitan dengan sumber daya finansial, immaterial, dan material yang gerakan tersebut memiliki, seperti jaringan, uang tunai, informasi, atau bakat khusus. Sumber daya ini berada dalam kendali baik individu maupun kelompok. Kedua, mobilisasi adalah prosedur penting di mana

para peserta bertujuan untuk menggunakan sumber daya yang mereka miliki guna mencapai tujuan gerakan tersebut. Kedua komponen ini perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan gerakan tersebut.

